

**PENGEMBANGAN *COMMUNITY BASED TOURISM*
SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI OBYEK WISATA PANTAI GEMAH
TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**Gladis Githa P.H.
145020101111016**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

**THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY-BASED
TOURISM AS PEOPLE'S ECONOMIC
EMPOWERMENT STRATEGY
(A CASE STUDY AT GEMAH BEACH IN
TULUNGAGUNG)**

MINOR THESIS

**By:
Gladis Githa P. H.
145020101111016**

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Attainment of the Degree of Bachelor of Economics**



**LEARNING
DEVELOPMENT
CENTER**
Jalan Pahlawan 15, 1 dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Jl. Sekeloa Timur 165 Malang
Telp. (0341-651994)



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

" PENGEMBANGAN *COMMUNITY BASED TOURISM* SEBAGAI STRATEGI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI OBYEK
WISATA PANTAI GEMAH TULUNGAGUNG)"

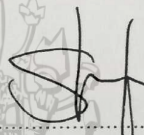
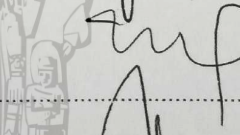
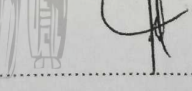
Yang disusun oleh :

Nama : Gladis Githa P.H.
NIM : 145020101111016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **30 Oktober 2018** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

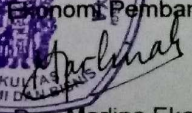
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Shofwan, SE., M.Si.
197305172003121002
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.
195503221981031002
(Dosen Penguji I)
3. Eddy Suprpto, SE., ME.
195807091986031002
(Dosen Penguji II)


.....

.....

.....



Marang,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,


Dra. Marlina Ekawati, M.Si., Ph.D.
196503111989032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Obyek Wisata Pantai
Gemah Tulungagung)**

Yang disusun oleh :

Nama : Gladis Githa Prastica Hape
NIM : 145020101111016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Sumber Daya

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.



Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dra. MARLINA EKAWATI, M.Si., Ph.D.
196503111989032001

Malang,
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

SHOFWAN, S.E., M.Si.
197305172003121002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GLADIS GITHA PRASTICA HAPE
Tempat, tanggal lahir : KEDIRI, 8 APRIL 1996
NIM : 145020101111016
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : SUMBER DAYA
Alamat : Jl. JOYO UTOMO V NO.512 MALANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

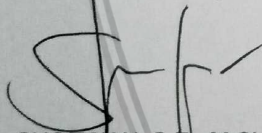
**Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Obyek Wisata Pantai Gemah Tulungagung)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



SHOFWAN, S.E., M.Si.
197305172003121002

Malang,

Yang membuat pernyataan,



GLADIS GITHA P.H.
145020101111016



Dra. MARLINA EKAWATI, M.Si., Ph.D.
196503111989032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gladis Githa Prastica Hape
NIM : 145020101111016
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 8 April 1996
Agama : Islam
Alamat : JL. Banjaran 1/GG. Baru No.4 Kediri
Nomor Telepon/HP : 085708884822
Email : gladisgitha08@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

- TK Perwanida MAN 3 (2000-2002)
- SDN Banjaran 3 Kediri (2002-2008)
- SMPN 3 Kediri (2008-2011)
- SMAN 3 Kediri (2011-2014)
- S1 Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang (2014-2018)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Staff Divisi Acara SG Cup Tahun 2016
2. Staff Saweri Gading FEB UB Tahun 2017

Pengalaman Kerja

1. Magang di PT Perkebunan Nusantara X (Pabrik Gula Pesantren Baru, Kediri), 04 September s/d 30 September 2017

**PENGEMBANGAN *COMMUNITY BASED TOURISM* SEBAGAI STRATEGI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI OBYEK
WISATA PANTAI GEMAH TULUNGAGUNG)**

Gladis Githa P.H.

Email : Gladisgitha08@Gmail.Com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan *Community Based Tourism* sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pantai Gemah Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yang dianggap memenuhi karakteristik yaitu pemerintah, stakeholders, dan masyarakat local setempat. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dimana jenis kegiatan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengembangkan wisata Pantai Gemah, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung seperti mengadakan program kerja dengan membentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), kemudahan dalam hal perizinan terkait pengembangan daerah wisata, pengadaan fasilitas di tempat wisata, dan melakukan kerjasama antar berbagai pihak seperti Perhutani, Pokdarwis, dan masyarakat desa Keboireng. Hal ini menjadi sebuah pendukung namun ada juga penghambatnya adalah kurangnya kesadaran pengunjung dalam hal kebersihan, akses jalan yang sulit, SDM masyarakat Keboireng yang rendah dan fasilitas/sarana prasarana di wisata Pantai Gemah yang kurang memadai. Saran yang dapat disampaikan untuk pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Wisata Pantai Gemah harus melakukan koordinasi dengan baik untuk mengembangkan wisata yang terdapat di daerah mereka yang harus ditanamkan sejak awal.

Kata Kunci : *Community Based Tourism*, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pantai Gemah Tulungagung

THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY-BASED TOURISM AS PEOPLE'S ECONOMIC EMPOWERMENT STRATEGY (A CASE STUDY AT GEMAH BEACH TULUNGAGUNG)

Gladis Githa P.H.

Email: Gladisgitha08@Gmail.Com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the synergy between the government and the community local in the development of Community Based Tourism as a community economic empowerment strategy at Gemah Tulungagung Beach. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Research subjects are considered to fulfill the characteristics of the government, stakeholders, and local local communities. Data collection of this study uses in-depth interviews, documentation and literature studies. Analysis of the data used in this study uses the interactive model Miles and Huberman where the types of analytical activities include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that in developing Gemah Beach tourism, various efforts were carried out by the Regional Government of Tulungagung Regency such as organizing work programs by forming Pokdarwis (Tourism Awareness Group), ease of licensing related to the development of tourist areas, procurement of facilities at tourist attractions, and cooperation between various parties such as Perhutani, Pokdarwis, and Keboireng village communities. This has become a support but there are also obstacles that are lack of visitor awareness in terms of cleanliness, difficult road access, low Keboireng community human resources and inadequate facilities / infrastructure in Gemah Beach tourism. Suggestions that can be submitted for parties involved in the development of Gemah Beach Tourism must coordinate well to develop tourism in their area that must be implanted from the beginning.

Keywords: *Community Based Tourism, Economic Empowerment of the Beach Community of Gemah Tulungagung*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Obyek Wisata Pantai Gemah Tulungagung) dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dorongan, bimbingan dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan berterimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahnya serta kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua Orang Tua, bapak Hadi Sudarso dan Ibu Wiwik Hari Prastiwi yang selalu memberikan dorongan berupa nasihat, do'a, perhatian, bantuan moril, dan bantuan materil serta motivasi yang bermanfaat bagi peneliti hingga selesai menempuh program studi S1 Manajemen.
3. Kakak saya beserta keluarganya a.k.a Kak Filial, Mbak Rere, Fiona yang selalu memberikan bantuan moril, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Shofwan, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak memberikan semangat dan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Ekawaty, SE., M.Si., Ph.D. selaku ketua program studi ekonomi pembangunan yang telah memberikan kemudahan dalam pembuatan skripsi
6. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri , SE., ME. selaku Ketua Jurusan ilmu ekonomi yang telah memberikan kemudahan selama proses pembuatan skripsi.
7. Bapak Drs Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kemudahan selama proses pembuatan skripsi.

8. Bapak – bapak POKDARWIS (kelompok sadar wisata) pantai gemah yang sudah memberikan kemudahan dalam mencari informasi yang saya butuhkan untuk melancarkan proses pembuatan skripsi
9. Rizqi dian saputra yang telah memberi dukungan dorongan berupa nasehat, do'a, perhatian, bantuan moril dan setia mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Geng #jarenekoncokenthel a.k.a ninis,rivani,reta,niar,agustina,putri yang selalu mendampingi selama masa perkuliahan hingga perskripsian dan selalu memberi semangat satu sama lain
11. Dita hapsari yang telah memberikan semangat, doa serta perhatian dalam mengerjakan skripsi ini
12. Saweri gading dan sawerita yang sudah menjadi keluarga di malang, yang selalu mensuport satu sama lain tidak hanya dilapangan saja tetapi diperkuliahan juga.
13. Semua pihak yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa yang tersusun ini masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PERSETUJUAN	III
SURAT PERNYATAAN	IV
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori	8
2.2.1. Pariwisata	8
2.2.1.1 Pengertian Pariwisata	8
2.2.1.2 Jenis Pariwisata	10
2.2.1.3 Unsur-Unsur Pariwisata	12
2.2.2. Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>)	14
2.2.2.1 Konsep <i>Community Based Tourism</i>	14

2.2.2.2 Ciri-Ciri <i>Community Based Tourism</i>	15
2.2.2.3 Prinsip <i>Community Based Tourism</i>	16
2.2.2.4 Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata	17
2.2.3 Unsur Lingkungan dalam <i>Social Cost</i> dan <i>Social Benefit</i>	27
2.2.4 Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>) Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi	28
2.2.5 Utilitas	32
2.2.6 Komunitas Berbasis Ekonomi	33
2.2.7 Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Objek Penelitian	37
3.3 Subjek Penelitian	38
3.4 Metode Pengumpulan Data	38
3.5 Metode Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	42
4.2 Hasil Penelitian dan Analisis Data	42
4.2.1 Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	42
4.2.2 Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Obyek Wisata Pantai Gemah Tulungagung)	49
4.2.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Melakukan Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Obyek Wisata Pantai Gemah Tulungagung)	60

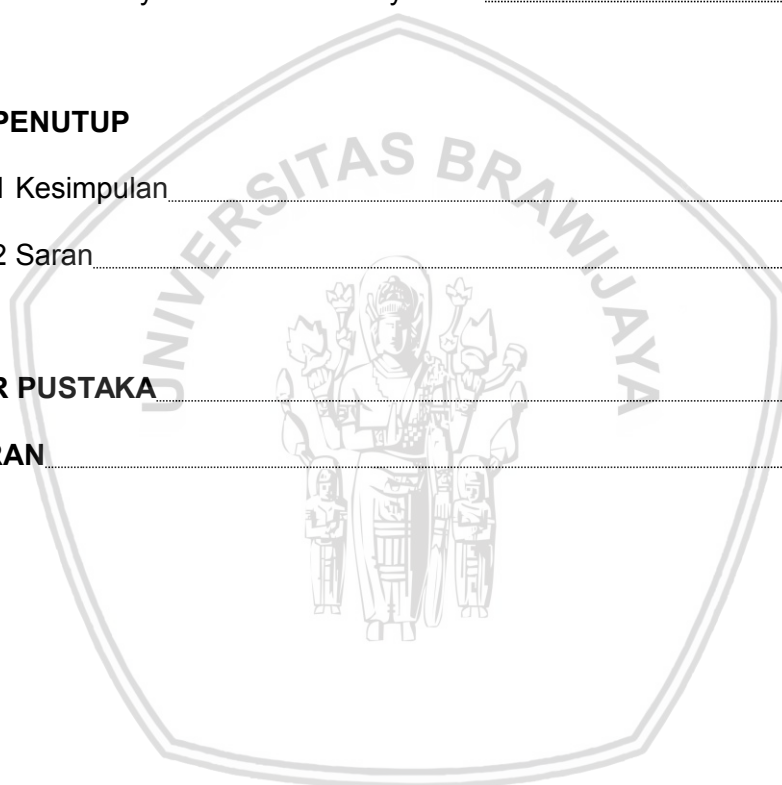
4.3 Pembahasan.....	72
4.3.1. Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	72
4.3.2 Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Obyek Wisata Pantai Gemah Tulungagung.....	75
4.3.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Melakukan Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	77

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	84
-----------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemangku Kepentingan Dalam Pariwisata.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data Miles Dan Huberman 2014.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Sektor pariwisata kini telah menjadi kebutuhan global. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri, termasuk industri pariwisata. Saat ini industri pariwisata merupakan bagian dari salah satu sentral penghasil devisa bagi Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata di dunia, hal ini disebabkan selain letaknya yang strategis dan wilayahnya yang sangat luas, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang mempunyai atraksi wisata yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi wisata yang cukup besar, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. memberdayakan masyarakat menurut Kartasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Wujud pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui konsep *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata

berbasis masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu bentuk kepariwisataan yang mengedepankan kepemilikan dan peran serta aktif masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat lokal maupun pengunjung, mengedepankan perlindungan kepada budaya dan lingkungan, serta memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat lokal.

Suharto, Krisna, Bobby (2015) menyatakan bahwa Community Based Tourism (CBT), adalah pembangunan kepariwisataan sebagai strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. CBT pada hakekatnya merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak, dalam bentuk pemberian akses pada manajemen dan sistem pembangunan kepariwisataan yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan kepariwisataan secara lebih adil bagi masyarakat lokal. Sedangkan menurut Hudson (dalam Timothy, 1999), CBT sebagai pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan ataupun minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

CBT merupakan model alternatif pembangunan dan pengelolaan wisata yang mampu memberikan output maupun outcome positif karena berbasis pada kesadaran akan kebutuhan wisata responsif dan demokratis (Moscardo, 2008: 60). Artinya CBT berakar pada kesadaran kebutuhan dan partisipasi masyarakat lokal, yang kemudian dikelola dengan menggunakan asas demokrasi (dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat). Model pariwisata berbasis masyarakat juga didukung dengan adanya UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan program Kementrian Perdagangan dan Ekonomi Kreatif

yang berupaya menjadikan sektor pariwisata sebagai basis program ekonomi kreatif dengan menekankan pada kreativitas produk lokal dan keadilan.

Provinsi Jawa Timur memiliki banyak daya tarik wisata pantai khususnya yang berada di bagian selatan. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai banyak potensi wisata pantai. Bagian selatan kabupaten ini berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah pantai yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai tempat wisata. Kawasan pantai ini jika dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Untuk mendukung pengembangan tersebut perlu dilakukan inventarisasi dan analisis potensi wisata pantai sebagai awal dari tindakan pengembangan wisata selanjutnya. Salah satu pantai yg terdapat di Kabupaten Tulungagung yakni Pantai Gemah. Pantai Gemah terletak di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Pantai Gemah termasuk dalam rangkaian pantai di Pantai Popoh, sebelah barat Pantai Gemah terdapat Pantai Bayem dan di sebelah timur terdapat Pantai Sidem. Jarak Pantai Gemah 32 km dari Kota Tulungagung. Tipe pantainya berpasir. Untuk pasirnya adalah kuarsa berliat. Lebar gisiknya 40 meter pada saat surut. Karena dekat dengan muara sungai niyama menjadikan air pantai ini terlihat sangat keruh. Di pantai ini tidak terdapat arus yang membahayakan. Kondisi jalan menuju pantai ini saat musim kemarau mudah untuk dilalui tetapi jika musim penghujan tidak bisa dilalui hanya bisa dilalui dengan menggunakan motor trail dan jeep.

Saat ini kunjungan wisatawan ke Pantai Gemah sangat tinggi. Rata-rata pada tahun 2017, omset yang masuk mencapai Rp 100 juta per bulan. Bahkan saat hari libur, dalam sehari omsetnya mencapai Rp, 30 juta (Memorandum edisi 30 Maret 2017). Dengan dijadikannya Pantai Gemah sebagai salah satu city branding Kabupaten Tulungagung, diharapkan adanya suatu partisipasi dari masyarakat yang tidak hanya dengan memanfaatkannya saja tetapi juga ikut menjaga. Partisipasi sendiri menurut seorang ahli bernama Dr. Made Pidarta, dalam Dwiningrum (2011) yang menyatakan bahwa partisipasi adalah melibatkan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.

Banyaknya pengunjung yang datang untuk berwisata ke Pantai Gemah dimanfaatkan oleh masyarakat local. Partisipasi masyarakat local cukup signifikan

dalam aktivitas pariwisata yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu Pantai Gemah merupakan obyek pariwisata berbasis masyarakat. Wisata tersebut ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tulungagung. Realitas tersebut seperti yang disampaikan oleh Wilkinson, Oliver Smith, dan Bankof (dalam Calgaro dan Lloyd, 2008) bahwa wisata sebenarnya mampu menjadi sumber penghidupan alternatif atau harapan baru dalam situasi fragmentasi ekonomi, sumber alam yang terbatas, ketidakseimbangan pasar, dan keterbatasan opsi penghidupan lainnya. Bahkan pariwisata juga memiliki kapasitas untuk menstimulasi pembangunan yang dapat memberikan efek positif seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan pengembangan sektor pariwisata, secara tidak langsung akan membuka lowongan kerja baru. Ibu-ibu setempat kini banyak menjual kuliner ikan asap menyambut banyaknya wisatawan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (<https://derap.id/dongkrak-pad-pemkab-tulungagung-giat-kembangkan-potensi-pariwisata/>).

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini berusaha menelusuri mekanisme-mekanisme yang dilakukan dalam memanfaatkan peluang wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melihat faktor pendorong atau pemicu progresifnya Wisata Pantai Gemah sebagai strategi pemberdayaan Ekonomi. sehingga judul dalam penelitian ini adalah **Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung)**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apa yang dimaksud dengan pengembangan *Community Based Tourism*?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung)?

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep dasar mengenai pengembangan *Community Based Tourism*
2. Mengetahui upaya pemerintah dalam pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan berharga jika memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga pihak lain. Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademik penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang insiasi masyarakat dalam memanfaatkan wisata secara bersama-sama, yang mana proses itu juga didukung oleh adanya modal sosial (intangible asset).

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

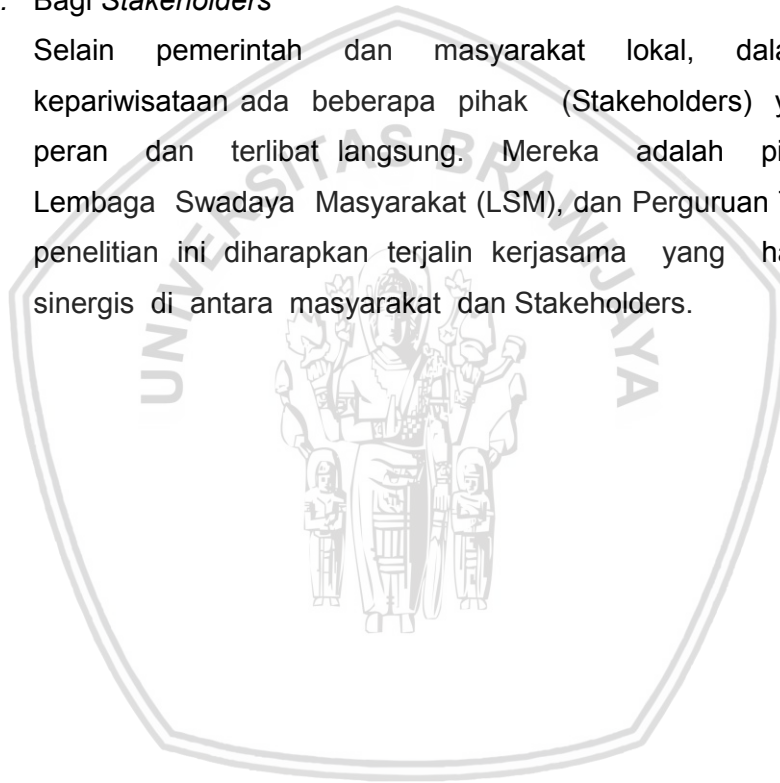
Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai masukan untuk mengembangkan pariwisata yang berpotensi melibatkan masyarakat lokal sehingga terbangun pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism (CBT).

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata agar manfaat adanya sektor pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat.

c. *Bagi Stakeholders*

Selain pemerintah dan masyarakat lokal, dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak (Stakeholders) yang memiliki peran dan terlibat langsung. Mereka adalah pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi. Melalui penelitian ini diharapkan terjalin kerjasama yang harmonis dan sinergis di antara masyarakat dan Stakeholders.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Purnamasari (2011) yang berjudul Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Toddabojo melalui konsep pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Dengan produk wisata yang ditawarkan, maka arahan yang paling tepat adalah mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan. Hasil dalam penelitian ini yakni secara umum, kondisi Kampung Toddabojo sudah sesuai dengan kriteria pariwisata berbasis masyarakat. Dari 18 kriteria pariwisata berbasis masyarakat yang telah dirumuskan, 10 diantaranya sudah sesuai dengan kondisi Kampung Toddabojo saat ini. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi Kampung Toddabojo saat ini sudah berbasis masyarakat, meski belum optimal, karena masih terdapat 5 kriteria yang masih cenderung sesuai dan 3 kriteria belum sesuai dengan kriteria pariwisata berbasis masyarakat. perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan dilakukan lebih fokus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis masyarakat.
2. Penelitian yang ditulis oleh Martiarini (2017) Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketenger Baturraden. Hasil penelitiannya adalah strategi pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Ketenger ada 8 strategi yaitu pengkoordinasian antara pengelola desa wisata dengan masyarakat, fasilitas pemerintah memberikan pendanaan untuk mengelola desa wisata, mengembangkan atraksi wisata mempromosikan Desa Wisata Ketenger, penyediaan akomodasi, analisis program kelembagaan, pengelolaan souvenir, pengadaan fasilitas umum. Sedangkan dalam perspektif ekonomi

Islam, pengembangan desa wisata berfokus menuju kesejahteraan, adil, memanfaatkan lingkungan tanpa merusak lingkungan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian yang akan dilakukan lebih fokus terhadap pengembangan wisata berbasis masyarakat dengan sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Penelitian yang ditulis oleh Zulfikar (2016) yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Disekitar Obyek Wisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Kabupaten Lampung Barat (Studi Kasus Di Desa Kubu Perahu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kubu Perahu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Balai Besar TNBBS dan masyarakat Desa Kubu Perahu masih belum optimal. 2) Hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kubu Perahu bahwa belum mencapai keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan strategi Community Based Tourism dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pariwisata

2.2.1.1 Pengertian Pariwisata

Pendit (2003), menjelaskan bahwa istilah pariwisata pertama kali diperkenalkan oleh dua budayawan pada sekitar tahun 1960, yaitu Moh. Yamin dan Prijono. Kedua budayawan ini memberikan masukan kepada pemerintah saat itu untuk mengganti istilah tour agar sesuai dengan bahasa khas Nusantara. Istilah Pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu sebagai berikut :

Pari = Penuh, Lengkap, Keliling

Wis (man) = Rumah, properti, Kampung, Komunitas

Ata = Pergi, Terus Menerus, Mengembara

Yang bila diartikan secara keseluruhan, pariwisata adalah Pergi Secara Lengkap, Meninggalkan Rumah (Kampung) untuk berkeliling secara terus menerus.

Pariwisata menurut Spillane (1987) adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan/keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan Pendit (2003), mendefinisikan pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Salah Wahab dalam Yoeti (2008), menjelaskan pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Dalam Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Keparwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Orang yang berpariwisata disebut wisatawan. Suwantoro (2004), mengartikan wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata dengan waktu tinggalnya sekurang kurangnya 24 jam di daerah atau negara lain, jika waktu wisata kurang dari 24 jam maka dapat disebut dengan pelancong. Selanjutnya, seseorang dapat dikatakan melakukan perjalanan wisata apabila: bersifat sementara, sukarela, dan tidak bertujuan untuk bekerja.

2.2.1.2 Jenis Pariwisata

Suwantoro (2004), menggolongkan pariwisata menjadi beberapa jenis, yaitu dari segi: 1) Jumlahnya: a) Individual Tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami istri; b) Family Group Tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain; c) Group Tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama sama minimal 10 orang, dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya. 2) Kepengaturannya: a) Pre Arranged Tour, b) Package Tour, c) Coach Tour, d) Special Arranged Tour, e) Optional Tour. 3) Maksud dan Tujuan: a) Holiday Tour, b) Familiarization Tour, c) Educational Tour, d) Pleasure Tour, e) Special Mission Tour, f) Special Programme Tour, g) Hunting Tour. 4) Penyelenggaraannya: Ekskursi, Safari Tour, Cruise Tour, Youth Tour, Wreck Diving.

Spillane (1987), membedakan jenis-jenis menjadi pariwisata untuk: 1) Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism), 2) Rekreasi (Recreation Tourism), 3) Kebudayaan (Cultural Tourism), 4) Olahraga (Sports Tourism), 5) Urusan Usaha Dagang (Business Tourism), 6) Berkonvensi (Convention Tourism). Masing-masing jenis pariwisata dijelaskan sebagai berikut.

Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism). Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism). Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism). Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain, selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian,

pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tari rakyat, dan lain-lain.

Pariwisata untuk Olahraga (Sports Tourism). Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori : a. Big Sports Event, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan b. Sporting Tourism of the Practitioner, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.

Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism) Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan. Pariwisata untuk Berkonvensi (Convention Tourism). Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.

Dalam hal ini CBT sebagai bentuk strategi pengembangan pariwisata merupakan jenis pariwisata Family Group Tour karena dilihat dari basis konsepnya CBT adalah pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat setempat sebagai pelaku utama harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, pemantuan, evaluasi demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat setempat juga memegang peran penting dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata. Peran pemerintah dan stakeholder lainnya harus mampu membina dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar bersedia berpartisipasi aktif di dalam pembangunan pariwisata (Demartoto: 2009).

Hal ini didukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Novaria (2017) bahwa terlaksananya kebijakan pengembangan CBT dan model pemasaran pariwisata tersebut akan meningkatnya kuantitas kunjungan wisman ke Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penyelenggaraan familiarization trip, peningkatan informasi pasar wisata, partisipasi pada bursa pariwisata, operasionalisasi Visit Tourism, penyelenggaraan Festival Ken-Duren, pengembangan

publikasi di media elektronik dan digital. maka jika dikategorikan dalam jenis pariwisata pengembangan CBT sangatlah cocok menjadi *Family Group Tour*.

2.2.1.3 Unsur-Unsur Industri Pariwisata

Pendit (2003), menyebutkan bahwa terdapat sepuluh unsur pokok dalam industri pariwisata. Industri pariwisata di suatu negara atau daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki unsur-unsur berikut ini: 1) Politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, 2) Perasaan ingin tahu, 3) Sifat ramah tamah, 4) Jarak dan waktu (aksesibilitas), 5) Atraksi, 6) Akomodasi, 7) Pengangkutan (Courier), 8) Harga-harga, 9) Publisitas dan Promosi, 10) Kesempatan Berbelanja. Kesepuluh unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Politik dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat. Unsur yang pertama ini terkait dengan peran pemerintah dalam rangka mengelola potensi pariwisata di daerahnya. Melalui Politik dan Kebijakan yang dikeluarkannya, pemerintah dapat mempengaruhi keberlangsungan industri pariwisata di daerahnya. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pariwisata di daerahnya atau justru menenggelamkan potensi pariwisata yang ada melalui kebijakannya.

Perasaan Ingin Tahu. Pada awalnya hakikat paling utama yang melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang terdalam, yang seba ingin tahu segala sesuatu selama hidup di dunia. Manusia ingin tahu segala sesuatu di dalam dan diluar lingkungannya, mereka ingin tahu tentang kebudayaan di negara asing, cara hidup dan adat istiadat negeri antah berantah, udara dan hawa udara yang berbeda beda di berbagai negeri, keindahan dan keajaiban alam dengan bukit, gunung, lembah serta pantainya, dan berbagai hal yang tidak ada dalam lingkungan sendiri.

Sifat Ramah Tamah. Sifat ramah tamah rakyat Indonesia ini merupakan salah satu “modal potensial” yang besar dalam bidang pariwisata, disamping keindahan alam dan atraksi yang menarik, sifat ramah tamah ini juga merupakan investasi tak nyata dalam arti kata sesungguhnya pada industri pariwisata karena merupakan daya tarik sendiri.

Jarak dan Waktu (Aksesibilitas). Yang harus diperhatikan oleh stakeholder yang berkompeten didalam indsutri pariwisata dewasa ini adalah

tentang waktu dan jarak tempuh yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk mencapai objek wisata.

Atraksi. Dalam dunia kepariwisataan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut atraksi, atau umumnya disebut objek wisata, baik yang biasa berlangsung tiap harinya serta yang khusus diadakan pada waktu tertentu di Indonesia sangat banyak.

Akomodasi. Akomodasi merupakan rumah sementara bagi sang wisatawan sejauh atau sepanjang perjalanannya membutuhkan serta mengharapkan kenyamanan, keenakan, pelayanan yang baik, kebersihan sanitasi yang menjamin kesehatan, serta hal-hal kebutuhan hidup sehari-hari yang layak dalam pergaulan dunia Internasional.

Pengangkutan (Courier). Faktor pengangkutan dalam dunia pariwisata membutuhkan syarat tertentu, antara lain jalan yang baik, lalu lintas lancar, alat angkutan yang cepat disertai dengan syarat secukupnya dalam bahasa asing yang umum dipergunakan oleh pergaulan dunia Internasional.

Harga-Harga. Di tempat atau di negara mana harga barang atau ongkos perjalan yang lebih murah dan lebih baik, sudah tentu wisatawan akan memilihnya.

Publisitas dan Promosi. Publisitas dan promosi yang dimaksud disini adalah propaganda kepariwisataan dengan didasarkan atas rencana atau program secara teratur dan berkelanjutan baik. Ke dalam Publisitas dan promosi ini ditujukan pada masyarakat dalam negeri sendiri dengan maksud dan tujuan menggugah pandangan masyarakat agar mempunyai kesadaran akan kegunaan pariwisata baginya, sehingga Industri Pariwisata di negeri ini memperoleh dukungannya. Ke luar, publisitas dan promosi ini ditujukan pada dunia luar dimana kampanye penerangan benar-benar mengandung berbagai fasilitas-fasilitas dan atraksi yang unik dan menarik terhadap wisatawan. Dalam hal ini Indonesia hendaknya dapat mengedepankan fasilitas yang unik dan memenuhi standar dunia industri pariwisata serta menyajikan atraksi menarik yang beda dari tempat lain.

Kesempatan Berbelanja. Kesempatan berbelanja atau lazim pula dikatakan shopping adalah kesempatan untuk membeli barang, oleh-oleh, atau souvenir untuk dibawa pulang ke rumah atau ke negaranya.

2.2.2 Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

2.2.2.1 Konsep *Community Based Tourism* (CBT)

Community Based Tourism (CBT) adalah bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata. Dalam hal ini masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan serta pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan. Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan

Salah satu point penting dalam konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu bagaimana masyarakat lokal dapat diberdayakan dan diikutsertakan dalam aktivitas kegiatan pariwisata itu sendiri dalam rangka memperoleh kemanfaatan dari kegiatan pariwisata. Selain itu mengingat peran masyarakat begitu penting dalam menjaga kondisi lingkungan dimana obyek Wisata itu berada, maka peneliti akan menampilkan beberapa konsep (definisi) dari beberapa teori mengenai konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community based tourism*). Kemudian juga akan dibahas beberapa konsep mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain: kewirausahaan dalam pariwisata (*Entrepreneurship in tourism*), peran komunitas dalam menjaga lingkungan dan peran pemimpin lokal (*Local leader*) dalam suatu komunitas masyarakat.

Community based tourism (CBT) menurut Muallisin (2007) adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat guna membantu wisatawan meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang tata cara hidup masyarakat lokal. CBT menjadi model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata dimulai dari kesadaran nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat sebagai upaya untuk membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan dan peluang masyarakat lokal.

Konsep lain tentang CBT, dikemukakan oleh Nugroho (2011) yaitu konsep usaha ekowisata yang dimiliki, dikelola dan diawasi oleh masyarakat setempat. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ekowisata mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan ekowisata sebanyak mungkin dinikmati oleh masyarakat setempat. Jadi, dalam hal ini masyarakat memiliki wewenang yang memadai untuk mengendalikan kegiatan ekowisata.

2.2.2.2 Ciri-Ciri Community Based Tourism

Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (growthoriented model) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. Sedangkan menurut Hudson dan Timothy (1999) dalam Sunaryo (2013) pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. *Community Based Tourism* bukan hanya sebagai sebuah harapan bagi negara-negara di dunia melainkan juga sebagai sebuah peluang, terdapat ciri-ciri yang dikemukakan oleh Nasikun (2001) yaitu:

- 1) Oleh karena karakternya yang lebih mudah diorganisasi di dalam skala kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman dan tidak menimbulkan banyak dampak negative seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional yang berskala massif.
- 2) Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha local, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat.
- 3) Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya, lebih dari pariwisata konvensional yang bersifat massif, pariwisata alternative yang berbasis komunitas memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas local untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam menikmati keuntungan perkembangan industry pariwisata, maka dari itu lebih memberdayakan masyarakat.

Pariwisata *alternative* berbasis komunitas tidak hanya memberikan tekanan pada pentingnya keberlanjutan cultural (cultural sustainability), akan tetapi secara aktif bahkan berupaya membangkitkan penghormatan para wisatawan pada kebudayaan local, antara lain melalui pendidikan dan pengembangan organisasi wisatawan. Ciri-ciri khusus dari CBT menurut Hudson (Timothy, 1999) adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat local, serta lain kelompok memiliki ketertarikan/minat, yang memberi control lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan.

2.2.2.3 Prinsip *Community Based Tourism*

Prinsip Community Based Tourism Dalam definisi yang disampaikan Suansri, gagasan untuk memunculkan tools berparadigma baru dalam pembangunan pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga keberlangsungan pariwisata itu

sendiri. Untuk itu ada beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri (2003:12) dalam gagasannya yaitu :

- 1) Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
- 2) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam setiap aspek
- 3) Mengembangkan kualitas hidup komunitas
- 4) Menjamin berkelanjutan lingkungan
- 5) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya pada komunitas
- 6) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- 7) Mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas
- 8) Berperan dalam menentukan presentase pendapatan dalam proyek-proyek yang ada di komunitas

2.2.2.4 Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata

Pengembangan pariwisata tentunya tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek yang hanya menerima apa yang diputuskan dari atas (pemerintah), tetapi masyarakat pada saat ini juga harus dilibatkan sebagai subjek dalam kerangka mengembangkan pariwisata (Manafie, 2003). Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata akan menyebabkan timbulnya rasa memiliki dan rasa ingin turut memelihara potensi pariwisata yang berada di daerahnya. Pandangan Razak, dalam sebuah Seminar Pengembangan Suatu Kawasan Bahari, mengungkapkan bahwa pembangunan pariwisata harus dikaitkan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat lokal sehingga kemajuan pariwisata akan terintegrasi dengan perekonomian masyarakat local (Manafie, 2003). Selanjutnya untuk menganalisis siapa yang berpartisipasi, Cohen dan Uthoff menyarankan agar mengidentifikasi ciri-ciri khusus, mereka itu adalah (Manafie, 2003): Pertama, penduduk setempat, Kedua, pemimpin masyarakat baik secara formal maupun non formal, Ketiga, pejabat pemerintah, Keempat, orang asing.

Khusus kategori satu yaitu penduduk setempat, penting untuk pengelompokan menurut umur, jenis kelamin, status keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tempat tinggal. Dimensi yang cukup penting untuk diperhatikan adalah “bagaimana partisipasi itu berlangsung” pertama, Apakah

inisiatif itu datang dari administrator atau penduduk setempat, kedua, apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan, ketiga, struktur partisipasinya, keempat, saluran partisipasinya, kelima, durasi partisipasinya, keenam, ruang lingkup partisipasinya, ketujuh, pemberian kuasa, yang meliputi bagaimana keterlibatan pengarah pada hasil yang diharapkan. Dalam mengukur partisipasi, harus digunakan indikator sikap dan perbuatan.

Selain itu, Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya (Subadra, 2006). Di negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidak terlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk *stakeholders* dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata. Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi (*Protected area*) dan pengusaha pariwisata untuk diikutsertakan dalam menjaga kelestarian alam dan biodiversitas yang ada di daerahnya. Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko Cindramata (*Souvenir*), warung makan dan lain-lain agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut (Subadra, 2006)

Dari penelitian Nengah, juga mengungkapkan bahwa Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan cara: Pertama, menyewakan tanahnya kepada operator pariwisata untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik pariwisata serta turut serta memantau dampak-dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata tersebut; Kedua, bekerja sebagai karyawan tetap atau paruh waktu di perusahaan operator pariwisata tersebut; Ketiga, menyediakan pelayanan jasa kepada operator pariwisata seperti; pelayanan makanan, transportasi, akomodasi dan panduan berwisata (*Guiding*); Keempat, membentuk usaha patungan dengan pihak swasta, yang mana masyarakat lokal menyediakan lokasi dan pelayanan jasanya sedangkan pihak swasta menangani masalah pemasaran produk dan manajemen perusahaan; Kelima, mengembangkan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan pariwisata berbasis kemasyarakatan (*community based tourism*).

b. Entrepreneurship Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata

Perkembangan pariwisata disuatu daerah secara tidak langsung akan membawa pengaruh positif terhadap daerah itu sendiri. Bardgett (Johannes, 2011), menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Itu bisa disaksikan melalui penyerapan tenaga kerja pada sektor perhotelan, restoran, rumah makan, dan sebagainya. Selain itu, Alloc dan Tetsu (Johannes, 2011) melihat bahwa pariwisata dapat menjadi bagian integrasi pembangunan ekonomi di suatu negara jika dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya. Misalnya, berbagai hotel membutuhkan beras dan sayur, ikan dan daging yang biasanya disediakan oleh petani, nelayan dan peternak lokal.

Ketika hubungan ini berjalan dengan baik atau ada hubungan simbiosis maka oleh para ekonom menyebutkannya dengan istilah *multiplier effect* atau efek pengganda (Johannes, 2011). etika efek multiplier ini dijalankan dengan mekanisme yang baik, maka diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Selain itu, perkembangan pariwisata juga akan menggerakkan aktivitas masyarakat lokal untuk mengembangkan dirinya sebagai entrepreneur lokal. Konsep *entrepreneur* (kewirausahaan), akhir-akhir ini ramai dibicarakan

mengingat perannya dalam mendukung perekonomian negara, dalam hal meningkatkan iklim usaha di kalangan komunitas usahawan menengah ke bawah.

Dilain pihak peran kewirausahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, diluar sektor formal. Dalam bukunya Nitisusastro (Mulyadi, 2010), ada tiga hal yang menentukan kesuksesan seorang wirausahawan yaitu; pertama, seorang yang disebut wirausaha (harus) menaruh perhatian yang serius terhadap usahanya. kedua, seorang wirausaha memiliki kemampuan menejeman yang baik dalam menjalankan dan mengoperasikan usahanya; Terakhir (ketiga), seorang wirausaha (harus) memiliki kompetensi. Selain itu, menurut Amelia ada dua faktor (Bachtiar & Reni, 2012) yang lebih mendasar yang mendorong seseorang melakukan wirausaha. Dua faktor itu yaitu, pertama, faktor lingkungan atau motivasi yang bersumber dari lingkungan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong pekerja berwirausaha. Dorongan positif contohnya adalah dorongan dari teman atau keluarga untuk berwirausaha (*having positive pull*).

Sedangkan dorongan yang bersifat negatif contohnya seperti kesulitan mencari pekerjaan ataupun ketidakpuasan kerja masing-masing. Faktor yang kedua yaitu, faktor psikologis. Artinya bahwa pekerja berwirausaha dapat disebabkan karena memang secara psikologis memiliki keinginan untuk berwirausaha atau mereka secara pribadi memiliki kemauan untuk berwirausaha dan yakin bahwa wirausaha adalah wujud kemerdekaan diri terlepas dari satu sistem pekerjaan yang tertentu.

Dalam konteksnya terhadap peran *entrepreneur local* dalam pengembangan pariwisata, Meyer dalam penelitiannya di Negara-negara Karibia menemukan bahwa pembangunan pariwisata mempunyai dampak langsung terhadap perekonomian lokal jika masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata (Johannes, 2011). Misalnya, para pengusaha jasa Wisata yang berkembang di suatu kawasan Wisata harus mendukung usaha lokal yang dijalankan oleh masyarakat melalui (memprioritaskan) membeli prodak (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh masyarakat setempat para pelaku usaha lokal. Ketika ini dilakukan maka pengusaha lokal akan dianggap sebagai mitra usaha pengusaha besar.

c. Peran masyarakat lokal dalam konservasi lingkungan hidup

Pada bagian ini, akan dibahas beberapa konsep mengenai peran komunitas masyarakat dalam konservasi lingkungan. Pembahasan ini menjadi urgen, mengingat aktivitas pariwisata tidak bisa dipisahkan dengan daya dukung lingkungan itu sendiri. Oleh sebab itu, menjaga kondisi lingkungan agar tetap terpelihara dan dijaga kelestariannya, menjadi penting untuk dibahas, agar kelak dapat bermanfaat untuk saat ini dan waktu yang akan datang. Krisis lingkungan global menjadi salah satu persoalan mendasar dan penting yang sudah seharusnya dibicarakan (dibahas) bersama dalam penyelesaiannya. Krisis global tengah terjadi akibat pembangunan yang terus meningkat. Semenjak revolusi industri, yang dimulai tahun 1750 an, telah terjadi banyak perubahan yang menyebabkan manusia dengan teknologi semakin menguasai alam. Penerapan modernisasi dalam pembangunan telah menyebabkan perubahan dalam hal kualitas hidup manusia dan gaya hidup konsumtifnya maupun peningkatan kualitas penduduk yang memerlukan dukungan dan sumber daya yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan krisis lingkungan global, sektor pariwisata secara tidak disadari telah ikut berpartisipasi dalam memperburuk kondisi lingkungan. Implikasi dari kemajuan atau berkembangnya pariwisata di daerah bisa dilihat dari terjadinya *degradasi* kondisi lingkungan. Sebagai contoh konkrit adalah bagaimana perkembangan pariwisata yang terjadi di Bali dan Sulawesi Utara. Dalam beberapa penelitian dijumpai bahwa akibat pengembangan pariwisata di Bali, menyebabkan terjadinya krisis lahan, krisis air bersih dan beberapa persoalan-persoalan pembangunan lainnya yang disebabkan oleh pembangunan-pembangunan fisik, seperti pembangunan hotel, restoran, lapangan golf dan sebagainya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Afrida, yang menemukan bahwa konsekuensi dari dibukanya Bali bagi pengembangan pariwisata missal berakibat pada terjadinya *degradasi* lingkungan dalam berbagai ranah, seperti berkurangnya ruang publik di pantai, perusakan sempadan sungai oleh pembangunan hotel atau Villa, pengambilan air tanah secara berlebihan, untuk lapangan golf, dan seterusnya (Anom, 2010). Atau dengan kata lain menurut Afrida, bahwa sektor pariwisata menyumbang cukup besar terhadap *degradasi* lingkungan alam Bali.

Dalam penelitian Johannes (2011), dijumpai bahwa persoalan lingkungan teristimewa persoalan sampah menjadi salah satu faktor yang menjadi momok bagi

masyarakat lokal di Bunaken. Ketika sampah terdampar di Bunaken bukan saja menjadi beban penduduk Bunaken sekarang, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi masalah bagi pengembangan pariwisata itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan persoalan-persoalan tersebut ada beberapa prinsip penting yang dikemukakan dalam pengelolaan pariwisata, di antaranya adalah perlunya penekanan pada konsep *local control* atau kontrol oleh masyarakat setempat (Anom, 2010).

Keberlanjutan pengembangan pariwisata sangat tergantung pada besarnya kontrol masyarakat lokal terhadap daerahnya. Ini menjadi penting mengingat masyarakat lebih mengetahui dan mengenal kondisi daerahnya dibandingkan dengan orang lain di luar komunitasnya. Akhir-akhir ini peran masyarakat lokal dalam partisipasinya mengontrol lingkungan tempat tinggalnya semakin minim, sehingga berakibat terhadap (semakin) termarginalisasi masyarakat lokal, atau semakin terdesaknya masyarakat lokal dari prosedur pengambilan keputusan, dan semakin mengkhawatirkan keberlanjutan pembangunan pariwisata itu.

Berdasarkan kajian ekologi manusia, ada juga teori yang menyatakan bahwa masyarakat lokal mempunyai “kearifan-kearifan tradisional” atau *ethnoscience*. *Ethnoscience* ini tumbuh dan berkembang serta terpelihara secara turun temurun dalam masyarakat berdasarkan atas pengalaman ratusan tahun dan umumnya sangat ramah lingkungan, karena konsep dasar yang ada pada masyarakat tradisional adalah penyelerasan diri dengan alam dengan memanfaatkan alam seperlunya untuk kehidupan sekarang dan dapat berkelanjutan untuk generasi mendatang. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan kalau tingkat pemanfaatan sumberdaya tidak melampaui kemampuan regenerasi sumber daya tersebut. Ini dimungkinkan untuk dilakukan apabila beberapa syarat dimungkinkan untuk dilakukan dalam setiap pembangunan pariwisata, di antaranya adalah agar manfaat pembangunan ekonomi terdistribusi secara adil, dan adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam pembangunan kepariwisataan, termasuk di dalam menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan.

Keterlibatan masyarakat lokal (*community based approach*) merupakan prasyarat mutlak tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan harus mampu mengangkat kembali *Tradisional knowledge, local*

knowledge atau *ethnoscience*, yang sudah eksis di masyarakat lokal selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang merupakan adaptasi ekologi masyarakat setempat. Ini menjadi penting, Sebagai contoh konkrit peran komunitas dalam konservasi lingkungan hidup selama ini telah dilakukan antara lain budaya Sasi di Maluku dan Papua. Budaya Sasi di kalangan masyarakat Maluku dan Papua dilakukan dalam hal menjaga kondisi alamnya. Prosesnya tidak hanya dengan menggunakan pendekatan budaya, dalam menjaga sumberdaya alam. Misalnya, penerapan Sasi pada beberapa lokasi budidaya ikan. Dimana kondisi lingkungan dimana keberadaan ikan-ikan tersebut, tidak boleh diambil atau dipanen sampai pada waktu yang telah ditentukan. Apabila dikemudian hari terdapat anggota masyarakat yang kedapatan mengambil ikan di luar dari waktu yang disepakati, maka anggota masyarakat tersebut akan dijatuhi hukuman adat atau agama oleh pemimpin adat setempat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam budaya tersebut. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa peran komunitas lokal dalam menjaga lingkungan hidup tetap dibutuhkan dalam kondisi kekininan krisis lingkungan global yang sedang melanda berbagai negara saat ini.

Oleh sebab itu, dalam konferensi Internasional Earth Summit (KTT Bumi) di Rio de Janeiro Brasil pada tahun 1992 (Anom, 2010), salah satu deklarasinya, mengamanatkan memberikan penekanan kepada pemerintah tentang pentingnya pembangunan yang meminimalkan kerusakan lingkungan. Salah satu cara yang diamanatkan dalam KTT tersebut adalah dengan melibatkan peran komunitas lokal didalamnya. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga dan meminimalkan krisis lingkungan global, dibutuhkan peran dan tanggung jawab komunitas lokal dalam partisipasi dalam menjaga konservasi lingkungan. Dalam tulisan ini, peneliti tidak membahas budaya Sasi secara mendetail. Sasi hanya dijadikan sebagai salah satu contoh bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem alam.

d. Peran Pemimpin Lokal (*Local Leader*) dalam Pengembangan Pariwisata

Dalam suatu organisasi faktor kepemimpinan menjadi sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi. Mengingat peran kepemimpinan sangat sentral dalam suatu organisasi, maka oleh Tohar dan Robbins mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu aktivitas untuk mempengaruhi perilaku

orang lain agar supaya mereka (anggota) mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Soares, 2010).

Dalam sebuah komunitas pada prinsipnya masyarakat tidak terbangun dari berbagai tindakan yang terpisah satu sama lain, tetapi harus dengan tindakan bersama (Wieringa, Douglas, C. Moore, and V. Barnes. 2008). Oleh sebab itu, untuk membangun kehidupan masyarakat harus ada aktor (manajer) yang mengendalikan, seperti yang dikatakan Max Well John bahwa kepemimpinan adalah soal bagaimana mengembangkan (mengelola) sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Finzel, 2002). Atau dengan kata lain, untuk menuju pada cita-cita (tujuan) institusi, peran seorang pemimpin sangat berperan penting untuk mengembangkan mengelola serta memberdayakan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi (komunitas).

Selain itu, kepemimpinan juga terfokus pada suatu proses peningkatan kinerja dan pertumbuhan organisasi, karena inti kepemimpinan adalah soal menciptakan penghargaan, kemungkinan dan masa depan. Pada prinsipnya kepemimpinan tidak hanya mengubah individu dan organisasi sampai kepada aspirasi mereka yang tertinggi, tetapi juga menciptakan momen-momen Visioner dan komprehensif yang memungkinkan orang berubah ke tingkat pengalaman dan kinerja yang baru.

Pemimpin (aktor) mempunyai peranan penting untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan (tindakan) yang dilakukan. peran itu sesuatu yang mengubah pergerakan arah yang berbeda atau mengubah budaya atau metode operasi. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan karakter yang solid. Sehingga, menjadi catatan bahwa, kecerdasan bukan (menjadi) faktor terkuat yang memotifasi orang untuk mengikuti dan berbaris di belakang pemimpin, tetapi yang menjadi daya tarik adalah menyangkut kualitas dari sifat dari pemimpin itu sendiri, seperti; integritas, kematangan, konsisten, antusiasme dan keuletan.

Dalam konteks empirik, ada sebuah hasil penelitian yang secara konkrit, menggambarkan peran ketokohan atau kepemimpinan lokal dalam sebuah komunitas masyarakat yang secara positif membawa perubahan dalam suatu proses pembangunan. Sugianto dalam disertasinya, menemukan bahwa ada peran pemimpin lokal dalam diri bapak Stevanus sebagai Tu'a Golo dalam memimpin komunitas warga kampung Mondo di Manggarai NTT, dalam menjalankan

aktivitas pembangunan di kampungnya. Walaupun tanpa adanya peran negara dalam pembangunan di kampung Mondo peran Tu'a Golo sangat dominan dalam memimpin komunitas masyarakatnya untuk melakukan dan menjalankan aktivitas pembangunan di kampung Mondo. Sebagai contoh, dengan pendekatan modal spiritual, kepemimpinan Tu'a Golo, masih menggunakan sifat otoriter sebagai seorang bapak terhadap anaknya masih tampak dalam kepemimpinannya.

Selain itu, beberapa contoh kepemimpinan bapak Stevanus sebagai Tu'a Golo, dapat dilihat dari contoh berikut: "Contoh kasus yang menunjukkan orientasinya kepada yang lemah dan kepentingan orang banyak adalah ketika Stevanus menerima bantuan babi untuk program babi bergulir, ia mengutamakan warganya yang miskin untuk mendapatkan babi-babi tersebut lebih dahulu, dan menempatkan dirinya digilirkan terakhir. Jika ketika ia memutuskan rute jalur pipa untuk saluran jalan air bersih, rumahnya sendiri mendapatkan kesempatan terakhir karena jalur pipa dibuat berakhir di sekitar rumahnya.

Hal inilah yang oleh Sugiantoro, dalam Disertasinya menemukan bahwa, ada dua hal kekhasan (unik) dari kepemimpinan lokal di Mondo. Kekhasan yang dimiliki pemimpin lokal itu antara lain, Pertama kekerabatan disana dipengaruhi oleh eksistensi pemimpin yang kuat. Selain itu, kedua, pola kepemimpinan cenderung otoriter namun karena dilandasi nilai kesatria yang membela kaum lemah, kepemimpinan tersebut justru menguatkan nilai komunal di kalangan warga. Kedua, nilai ksatria dan komunal ini tak lepas dari penghayatan spiritual para pemimpin Mondo dan warganya yang sangat menghargai leluhur.

Posisi tinjauan teroris yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan pijakan (titik tolak) dari empat konsep besar sintesa. Konsep-konsep tersebut antara lain, pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat yang didalamnya memuat, konsep partisipasi komunitas dalam menjaga lingkungan, kewirausahaan, dan peran pemimpin lokal. Keterkaitan antara konsep-konsep tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam melihat (menjelaskan bagaimana komunitas masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Tujuan mulia pembangunan pariwisata berkelanjutan sejatinya adalah, bahwa pembangunan kepariwisataan (harus) berpijak pada pertama, prinsip keberlangsungan ekologi lingkungan dimana obyek wisata itu berada; Kedua, menjaga kelangsungan sosial budaya masyarakat. Ini menjadi

penting mengingat bahwa selain daya dukung lingkungan alam, keberlangsungan sosial budaya masyarakat menjadi pilar utama dalam daya tarik pariwisata; Ketiga, kelangsungan ekonomi, menjadi hal yang mutlak didapati (diperoleh) oleh masyarakat dan daerah akibat positif dari pengembangan pariwisata tersebut; dan keempat, kemanfaatan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Untuk pencapaian tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak (*Stakeholder*) untuk bekerjasama dalam pencapaiannya. Dalam konteks ini, peran serta komunitas masyarakat menjadi fokus kajiannya. Peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata, menjadi sesuatu yang urgen untuk diterapkan saat ini dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Pentingnya peran komunitas masyarakat lokal tersebut dalam mengembangkan pariwisata disebabkan karena, masyarakatlah yang lebih tahu seluk beluk dan kondisi lingkungan dimana mereka tempat, dibandingkan oleh orang lain di luar komunitasnya. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk dikembangkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan komunitas lokal di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita (tujuan) pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat dicapai walaupun dalam tataran konteks lokal.

Salah satu konsep yang juga penting dalam peran komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah, peran pemimpin lokal. Peran pemimpin lokal menjadi sentral dalam sebuah komunitas mengingat, sosok tersebut sangat mengenal anggota komunitasnya. Sehingga apapun yang disampaikan atau dikerjakan oleh pemimpin tersebut, dianggap sebagai sesuatu tindakan yang harus ditiru untuk dilakukan. Selain itu pemimpin lokal sangat memahami lingkungan dan adat istiadat komunitas setempat, karena secara turun temurun atau adat istiadat pemimpin lokal di suatu komunitas melekat pada peran itu. Belajar dari pengalaman pemimpin lokal pada masyarakat Mondo, Manggarai NTT, bisa dijadikan sebagai model pemimpin lokal yang memanfaatkan pengetahuan dan kearifan local dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks inilah, peran pemimpin lokal diyakini mampu bersama-sama komunitas masyarakat local berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Peran pemerintah dalam mengembangkan Community Based Tourism dapat dilakukan dengan:

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Memudahkan dalam perizinan
- 3) Pengadaan fasilitas, dan
- 4) Kerjasama dengan berbagai pihak

2.2.3 Unsur Lingkungan dalam *Social Cost dan Social Benefit*

Pada konsep pengembangan CBT sendiri awalnya berawal dari kecenderungan seseorang untuk memperhitungkan antara *costs* dan *benefits* yang akan dia terima ketika menjalani hubungan dengan pihak lain seperti costs of cheating (biaya yang harus dibayar jika salah satu pihak melanggar perjanjian) dan value of benefits (nilai atau manfaat dari upaya menjaga, memelihara, dan mempertahankan kepercayaan). Selain itu, pada tipe ini masyarakat cenderung untuk memperhitungkan *cost dan benefit* jika mempercayai penjual yang ada di sekitaran lokasi pariwisata.

Dalam hal ini pariwisata yang dikembangkan di negara-negara berkembang telah menjadi sorotan para pemerhati lingkungan khususnya Wisata Ekologis sebagai alternatif pengelolaan pariwisata "ramah lingkungan". Dalam model ecotourism atau wisata ekologis, kegiatan pariwisata dikembangkan sebagai sebuah perjalanan (wisata) bertanggung jawab ke wilayah-wilayah alam, yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Western dalam Lindberg & Hawkins, 1993). Sedangkan menurut *World Tourism Organization* (WTO) dan *United Nation Ecotourism Program* (UNEP), wisata ekologis setidaknya harus melingkupi, tidak hanya memberi perhatian pada alam, tetapi juga pada penduduk asli dan kultur umumnya di wilayah itu sebagai bagian dari pengalaman menarik para pengunjung (wisatawan).

Wisata Ekologis memiliki muatan pendidikan dan interpretasi sebagai bagian yang ditawarkan pada wisatawan. Wisata ekologis setidaknya harus melingkupi, tidak hanya memberi perhatian pada alam, tetapi juga pada penduduk asli dan kultur umumnya di wilayah itu sebagai bagian dari pengalaman menarik para pengunjung (wisatawan).

Secara umum, wisata ekologis harus dikembangkan secara partisipatif misalnya dikelola oleh kelompok kecil, dengan usaha kecil yang di kelola

masyarakat setempat. Dengan demikian wisata ekologis sebenarnya berupaya mengembangkan sumber-sumber lokal dan peluang kerja lokal menjadi potensi-potensi wisata dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat serta sekaligus meningkatkan perhatian penduduk lokal dan pengunjung pada pelestarian alam. Selain itu, wisata ekologis ditujukan untuk mengurangi pengaruh negatif pada alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta mendukung perlindungan dan pelestarian alam dengan memberikan manfaat (*benefit*) dari pengelolaan alam tersebut.

Saat ini, perubahan pola pengelolaan wisata massal menuju pengelolaan wisata ekologis mendesak untuk segera didorong. Namun perubahan dan pengembangannya masih memerlukan proses dan waktu. Dukungan kebijakan pariwisata, peningkatan kapasitas teknis masyarakat untuk mengelola wisata, memperkuat jaringan ekowisata, dan pemasaran produk wisata menjadi hal penting yang perlu dipersiapkan.

2.2.4 Pengembangan Pariwisata Berbasis masyarakat (Community Based Tourism) Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

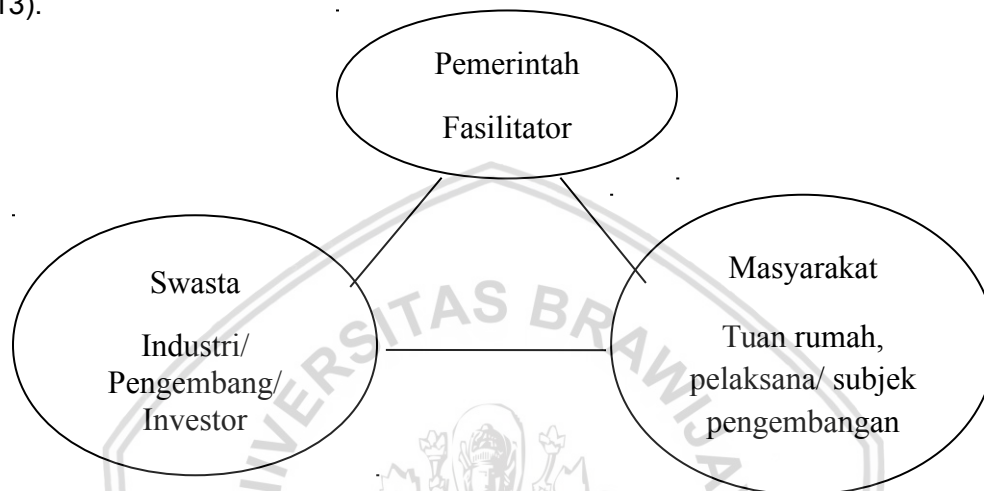
Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di lokasi yang menjadi tujuan (destinasi) wisata melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan.

Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau empowering dari golongan masyarakat yang powerless (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Sinclair (1998) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti

usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam pariwisata (Sunaryo, 2013).



Gambar 2.1 Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata

Sumber: Sunaryo (2013)

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (resource) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia. Murphy (1988), Larry Dawyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dalam Sunaryo (2013) pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut.

Sunaryo (2013) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
2. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata (Sunaryo (2013)).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo (2013) bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Murphy dalam Sunaryo (2013) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang

berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism sebagai berikut:

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha pariwisata juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Sedangkan menurut Hudson dan Timothy (1999) dalam Sunaryo (2013) pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau community based tourism, yaitu :

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Pendidikan Kepariwisata untuk masyarakat lokal (Sunaryo, 2013).

Suansri (2003) menyebutkan beberapa prinsip dari Community-Based Tourism yang harus dilakukan, yaitu: 1) mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata; 2) melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya, 3) mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan; 4) meningkatkan kualitas kehidupan; 5) menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal; 7) mengembangkan pembelajaran lintas budaya; 8) menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia; 9) mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat; 10) memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat; dan 11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa Community-Based Tourism (CBT) sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (mass tourism). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

2.2.5 Utilitas

Segala usaha yang dilakukan untuk mencapai kepuasan maksimum dengan pendapatan yang terbatas inilah yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa di pasar. Untuk menganalisa pembentukan permintaan konsumen secara lebih akurat, maka akan digunakan beberapa asumsi yang akan menyederhanakan realitas ekonomi. Atas dasar beberapa hal tersebut maka terdapat pokok bahasan teori nilai guna (*utility*).

Utility atau nilai guna sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Pada teori keseimbangan, diketahui bahwa teori keseimbangan menggambarkan antara kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang diminta. Manfaat inilah yang dikenal dengan istilah utilitas (*utility*). Jadi sebenarnya permintaan suatu komoditas menggambarkan permintaan akan manfaat dari komoditas tersebut (Sugiarto Dkk, 2007)

Utility atau daya guna suatu barang sebenarnya berarti kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia secara obyektif. Produksi menciptakan kemampuan tersebut. Namun baru dirasakan apabila barang itu dikonsumsi. Oleh karena itu, pengertian *utility* dalam analisis perilaku konsumen berarti manfaat yang dirasakan dari konsumsi suatu barang atau kepuasan yang diperoleh dari barang / jasa tersebut dan dengan demikian juga penghargaan konsumen terhadapnya. Jadi *utility* juga merupakan suatu yang subyektif, tergantung pada pribadi yang melekat pada diri konsumen yaitu sejauh mana kebutuhannya terpenuhi dengan konsumsi barang/jasa tertentu (Gilarso, 2003).

Dalam sejarahnya, teori nilai guna (*utility*) merupakan teori yang terlebih dahulu dikembangkan untuk menerangkan perilaku individu dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Hal ini dapat dilihat bahwa analisis tersebut telah memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas tentang prinsip-prinsip pemaksimalan kepuasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berfikir secara rasional dalam memilih berbagai barang keperluannya. Disini kita juga akan mempelajari bagaimana suatu barang dapat memberikan kenikmatan terhadap individu dan bagaimana barang tersebut sama sekali tidak dapat memberikan kenikmatan terhadap seseorang.

2.2.6 Komunitas Berbasis Ekonomi

Komunitas Menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.

Community berasal dari bahasa Latin yang artinya komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu – individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumberdaya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. (Wenger, 2002:4)

Komunitas memiliki beberapa komponen. Komponen yang termasuk dalam komunitas adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat sebagai kelompok atau himpunan orang – orang yang hidup bersama terjalin satu sama lain ketika orang – orang tersebut menjadi anggotanya.
- 2) Kebudayaan sebagai alat pemuasan kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani yang terdiri dari hasil pemuasan dan binaan manusia baik berupa benda maupun bukan benda.
- 3) Kekayaan alam sebagai sumber – sumber materi bagi kelangsungan hidup manusia.

Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya.

Salah satu fungsi penting yang dijalankan *community*, yaitu fungsi mengadakan pasar karena aktifitas ekonomi. Selain sebagai pusat pertukaran jasa – jasa di bidang politik, agama, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. Disamping itu di dalam komunitas ditandai dengan adanya hubungan sosial antara anggota kelompok masyarakat. Secara ringkasnya dapat disimpulkan sebagai ciri – ciri komunitas adalah daerah atau batasan tertentu, manusia yang bertempat tinggal, kehidupan masyarakat dan hubungan sosial antara anggota kelompoknya.

Melalui adanya komunitas yang berbasis ekonomi tentunya ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Bentuk. Pemberdayaan yang kedua, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

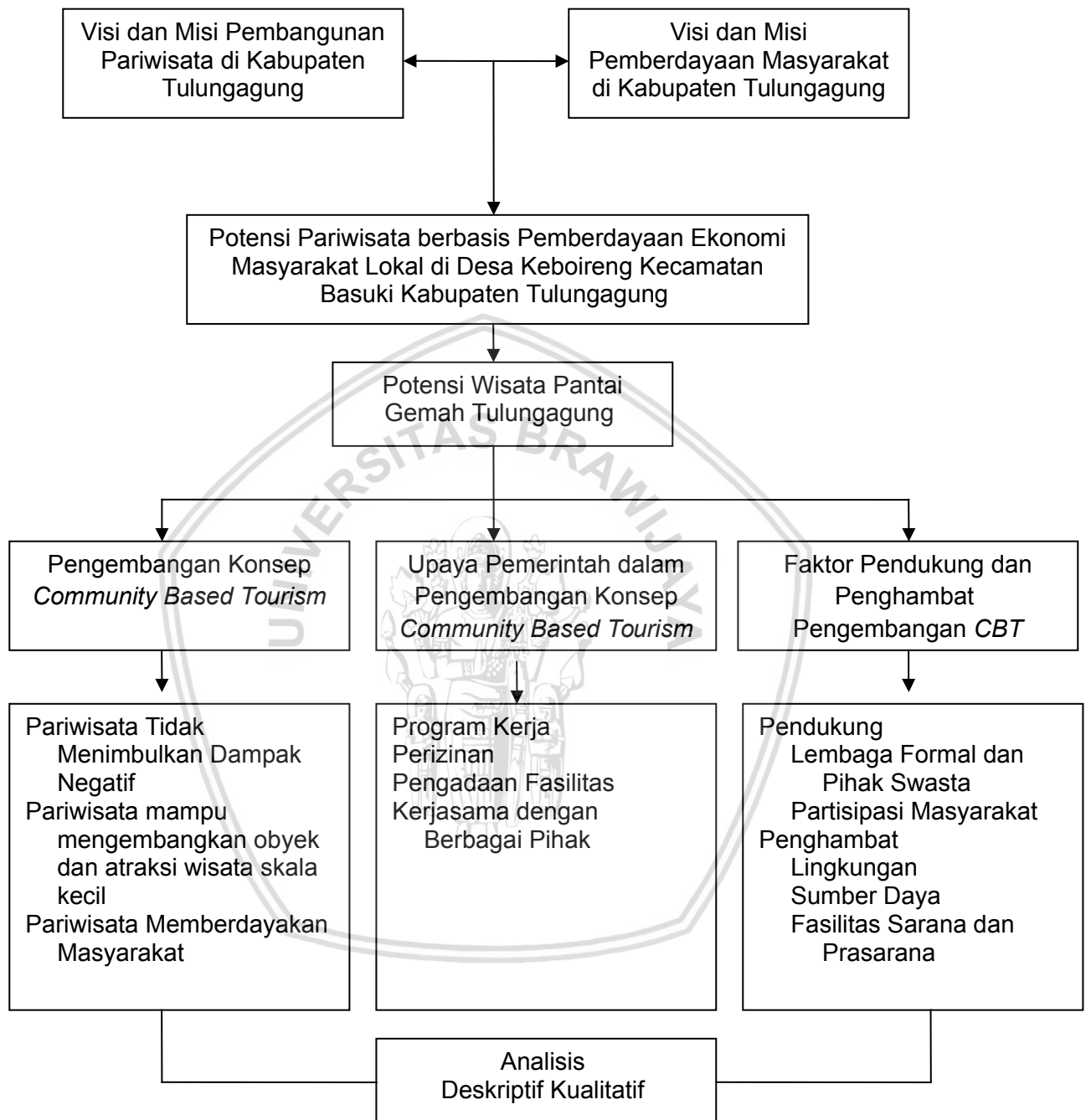
2.2.7 Kerangka Pikir

Pariwisata Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membantu pemasukan negara. Pariwisata sebagai suatu sektor ekonomi yang memiliki dampak berjenjang (Multiplier effect) mampu menghidupkan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perhotelan, kuliner, budaya dan lain sebagainya, selanjutnya pariwisata mampu menarik tenaga kerja yang banyak. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar melalui pengelolaan pariwisata yang baik.

Pariwisata ini tentu saja tidak akan berjalan dengan sendirinya, namun dibutuhkan beberapa faktor penting pendukungnya. Salahsatu faktor pendukung yang penting yaitu peranan pemerintah, baik itu dalam hal pembuatan kebijakan yang mendukung, maupun sebagai promotor utama ke dalam maupun ke luar negeri.

Melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah, diharapkan sektor pariwisata dari waktu ke waktu menjadi berkembang dan lebih kuat. Melalui perannya sebagai promotor, pemerintah diharapkan mampu mengangkat potensi-potensi pariwisata di Indonesia yang dirasa masih belum optimal pengelolaannya. Sebagaimana dijelaskan Pendit (2003) bahwa peran pemerintah dan rakyat adalah penting dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di negara atau daerahnya. Artinya, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan peningkatan sektor pariwisata, lalu rakyat harus selalu mendukung berbagai kebijakan.

Dengan melihat fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, maka keberhasilan di sektor pariwisata tidak akan bisa dilepaskan dari peran Pemerintah selain sebagai motivator, juga untuk meningkatkan sebagai dinamisator, fasilitator, dan sekaligus implementor. Peran-peran tersebut direalisasikan melalui berbagai program demi tercapainya pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism). Bila disajikan dalam sebuah bagan, maka gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 2008). Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmojo, 2005). Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan data lisan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui informan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

3.2 Objek Penelitian

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2007). Obyek dari penelitian ini adalah pengembangan *community based tourism* sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di obyek Wisata Pantai Gemah Tulungagung.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Adapun subjek penelitiannya adalah masyarakat setempat, pemerintah desa setempat dan *stakeholders* yang berkaitan dengan pariwisata.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Riyanto, 2011). Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur dimana pelaksanaanya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-nya tentang strategi pengembangan kapasitas melalui pedoman wawancara yang telah disusun

b. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010) bahwa dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen tertulis, seperti dokumen laporan, SOP, dan aturan. Dalam penelitian ini pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan pengumpulan data yang berasal dari arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian, dengan mengambil data sekunder di antaranya data yang berbentuk laporan-laporan kegiatan dalam pengembangan community based tourism sebagai strategi

pemberdayaan ekonomi masyarakat di objek wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung.

c. Studi Pustaka

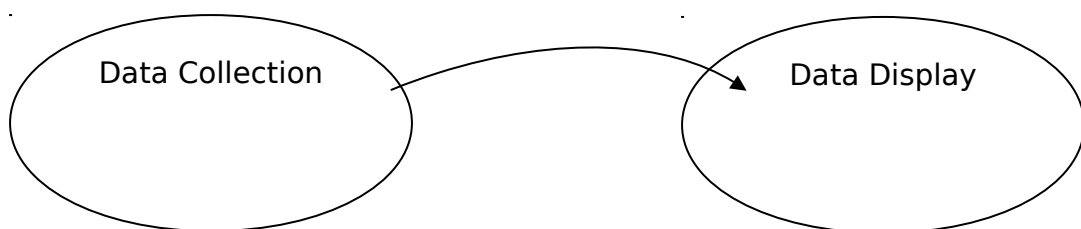
Nazir (2005) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan menggali keterangan-keterangan, serta mempelajari buku-buku literatur dan makalah untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

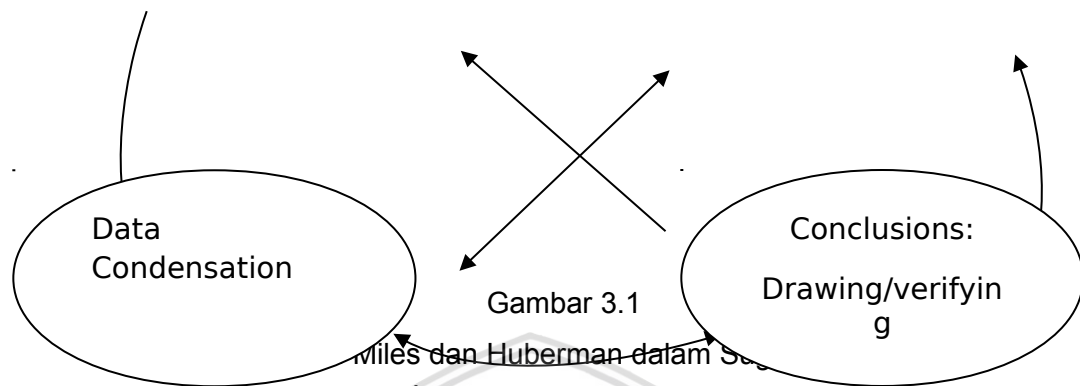
3.5 Metode Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

Bogdan dalam Sugiyono (Bungin, 2003) mengemukakan bahwa, “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Model interaktif menurut Miles dan Huberman (2014) “Dalam pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus dan interaktif”. Berikut ini adalah gambar 3.1 mengenai komponen dalam analisis data, yaitu :





- a. Pengumpulan data (*Data collection*)
Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrument penelitian seperti wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.
- b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu adanya pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart.
- c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Sugiyono menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut setelah proses reduksi dan penyajian data. Setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Pantai Gemah terletak di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung berada di desa Keboireng kecamatan Besuki, daya tarik pantai Gemah mulai terdengar oleh masyarakat dengan terbangunnya Jalur Lintas Selatan sehingga akses menuju pantai Gemah terbuka dan mudah dijangkau dengan kondisi jalan yang mulus. Pemandangan sepanjang jalan menuju pantai Gemah akan sangat memanjakan mata para wisatawan untuk menikmati keindahan panorama pegunungan dan luasnya lautan dari atas Jalur Lintas Selatan.

Kawasan pantai Gemah ditumbuhi oleh pohon cemara udang sehingga menambah kesejukan di kawasan pantai tersebut. Hamparan pantai yang luas membuat daya tarik para wisatawan untuk melakukan atraksi wisata diantaranya bermain pasir dan air laut, bermain perahu wisata, bermain ATV dan wahana flying fox di tepi pantai dengan sensasi yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan telah berdiri warung-warung yang menjual aneka macam kuliner khas laut, souvenir dan fasilitas toilet/ kamar mandi untuk tempat berbilas para wisatawan setelah bermain air laut.

Adapun visinya adalah Pantai Gemah wisata pantai yang gemah ripah loh jinawi. Sedangkan Misinya adalah menjadikan wisata pantai Gemah salah satu tujuan wisata Jawa Timur dan Nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pendirian wisata pantai Gemah adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar obyek wisata dan masyarakat Tulungagung pada umumnya, dan menjadikan pantai Gemah sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Tulungagung

4.2 Hasil Penelitian Analisis Data

4.2.1 Pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat atau community based tourism merupakan konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, di mana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Secara prinsip community based tourism berkaitan erat

dengan adanya kepastian partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Oleh karena itu, pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat (*community based tourism*) yang meliputi dampak positif pariwisata mencakup social cost dan benefit, mengembangkan obyek dan atraksi wisata skala kecil dan memberdayakan Masyarakat.

Pada dasarnya Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya membangun dari segi fisik (material) saja, akan tetapi dari segi non fisik juga terbentuk. Tetapi juga membangun diri masyarakat atau membangun daya guna untuk menyesuaikan diri dari pertimbangan-pertimbangan pariwisata lain dan masyarakat mulai bersaing dengan pengelolaan pariwisata yang lain, selain itu masyarakat juga mempersiapkan diri menghadapi arus komersialisasi pariwisata alam. Maka hal inilah yang sangat berkaitan dengan manfaat yang muncul akibat adanya pengembangan yaitu adanya social cost dan social benefit di dalamnya sehingga tidak ada unsur negatif akibat pengembangan pariwisata tersebut.

Provinsi Jawa Timur memiliki banyak daya tarik wisata pantai khususnya yang berada di bagian selatan. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai banyak potensi wisata pantai. Bagian selatan kabupaten ini berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah pantai yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai tempat wisata. Kawasan pantai ini jika dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Untuk mendukung pengembangan tersebut perlu dilakukan inventarisasi dan analisis potensi wisata pantai sebagai awal dari tindakan pengembangan wisata selanjutnya.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang berpotensi untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Di Kabupaten Tulungagung terdapat empat objek wisata daerah yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Wisata Tulungagung menawarkan sejumlah objek wisata dengan daya tariknya masing-masing. Namun, masih kurangnya upaya dari pemerintah daerah yang belum maksimal dalam

mempromosikan wisata tersebut mengakibatkan potensi-potensi objek wisata yang dimiliki tidak dapat berkembang secara optimal. Di sinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang di miliki bisa di kembangkan secara optimal. Didalam memajukan sektor pariwisata ditingkat daerah peran pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak yang selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menentukan strategi-strategi pembangunan kepariwisataan.

Pantai Gemah terletak di desa Keboireng, kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Pantai Gemah termasuk dalam rangkaian pantai di Teluk Popoh, sebelah barat Pantai Gemah terdapat Pantai Bayem dan di sebelah timur terdapat Pantai Sidem. Jarak Pantai Gemah 32 km dari Kota Tulungagung. Tipe pantainya berpasir. Untuk pasirnya adalah kuarsa berliat. Lebar gisiknya 40 meter pada saat surut. Karena dekat dengan muara sungai nyama menjadikan air pantai ini terlihat sangat keruh. Di pantai ini tidak terdapat arus yang membahayakan. Kondisi jalan menuju pantai ini saat musim kemarau mudah untuk dilalui tetapi jika musim penghujan tidak bisa dilalui hanya bisa dilalui dengan menggunakan motor trail dan jeep.

Pada awalnya pengembangan objek wisata Pantai Gemah merupakan inisiatif dari karang taruna dan masyarakat sekitar yang melihat potensi dari objek wisata Pantai Gemah. Pembangunan objek wisata tersebut dilihat sebagai upaya pemberdayaan anggota karang taruna khususnya pemuda pemudi Desa Keboireng dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini ketua Karang Taruna Pemuda Pajaresuk melihat bahwa dengan dikelolanya objek wisata Pantai Gemah menjadi obyek wisata yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan anggota karang taruna baik dari segi perekonomian maupun perkembangan Desa Keboireng.

Obyek wisata Pantai Gemah menyediakan tempat berdagang bagi masyarakat sekitar. Masyarakat yang berjualan di sekitar objek Pantai Gemah berjumlah 20 orang dan untuk pengelolaan obyek wisata Pantai Gemah

terdapat 15 orang karyawan (Skema Data Pantai Gemah, 2017). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pengembangan objek wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat di Desa Keboireng.

Kondisi awal demikian yang dijumpai masyarakat atau wisatawan local setempat menimbulkan sebuah ide yang terpikirkan untuk mengembangkan sebuah strategi baru sehingga pantai gemah akan mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakat setempat. Seperti yang diuraikan narasumber sebagai berikut:

“Ya awalnya Pantai Gemah Tulungagung Cuma pantai biasa yang dikunjungi masyarakat desa setempat kabupaten Tulungagung saja banyak nggak taunya sebelum dikembangkan jadi bagus seperti sekarang soalnya sudah akses jalan yang gampang juga”

Berangkat dari sebuah keinginan maka perlahan-lahan masyarakat setempat berpikir untuk mengembangkan sesuatu yang berbeda di objek pariwisata yang mereka miliki dimana harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan (*community-based tourism development*). Pengalaman yang dimiliki salah satu masyarakat setempat mengembangkan ide dan potensi yang dimiliki ternyata didukung oleh banyak masyarakat. Seperti yang diungkapkan staff pemerintah desa berikut ini :

“Awalnya ya nggak paham mbak pakai strategi apa kemudian kita punya pemuda dia lulusan sarjana dan sampaikan pada saya untuk melakukan pengembangan kalau pantai Cuma untuk lokasi persinggahan tanpa ada komersilnya juga rugi jadi kita sharing apa dampak manfaat untung ruginya gitu awalnya ya ragu tapi saya sosialisasikan ke warga banyak yang mendukung”

Pada awalnya pariwisata setempat hanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat tanpa bantuan apapun hanya pemerintah desa saja namun dengan adanya potensi dan ide yang muncul maka sosialisasi dilakukan

guna masyarakat memahami konsep pembangunan berkelanjutan melalui CBT itu sendiri.

Pada dasarnya wisata akan berkembang dengan baik apabila wisatawan memiliki waktu kunjungan yang lama. Artinya tamu akan banyak mengeluarkan biaya atau uang di tempat wisata tersebut. Oleh karena itu perlu secara terus menerus membina sikap/tata krama masyarakat kearah yang lebih baik. Memang tidak berarti masyarakat sekitar daerah wisata harus merubah sikap/tata karma sesuai dengan sikap/tata krama yang dimiliki wisatawan melainkan harus menunjukkan kemuliaan agar wisatawan menjadi betah dan merasa aman di tempat wisata.

Diawali dengan sikap tata karma yang baik oleh masyarakat sekitar terhadap pengunjung yang memesan tiket masuk. Tidak banyak banrol harga tiket yang diberikan dimana satu pengunjung cukup membayar uang Rp 7.500 saja yang sudah mencakup administrasi dan asuransi. Seperti dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini “

“Ya yang jelas ramah dulu dan harga tiket kita juga tidak tinggi hanya 7.500 sudah sama parkir asuransi dan administrasi dan itu saya rasa sudah murah sekali dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti yang bersih-bersih dan jaga kan dapat kesenangan sendiri”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ada begitu banyak alasan positif mengapa suatu destinasi pariwisata perlu dikembangkan, terlebih lagi bagi pantai gemah yang memiliki lokasi wisata strategis serta potensi masyarakat yang baik dimana akan banyak menimbulkan keuntungan meski tidak menutup sebuah kerugian pula.

Konsep pengembangan CBT ini merupakan Pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat, munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat berdasarkan atas dua pendekatan. Pertama; pelibatan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sehingga dengan demikian adanya jaminan pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan. Kedua; membuat umpan balik yang pada hakikatnya

merupakan bagian yang tidak terlepasnya dari kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat berdasarkan wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

“Ya jelasnya kalau tidak ada partisipasi masyarakat kan nggak mungkin jalan secara individu apalagi pemerintah sulit juga kalau tidak disokong terus jadi intinya memang adanya kesadaran masyarakat setempat”

Melalui CBT diharapkan Masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki, dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pengelolaannya. Pengemasan pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan ekowisata yang sejatinya mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan usaha ekowisata yang berbasis masyarakat di kawasan Pantai Gemah Tulungagung.

CBT merupakan usaha pengembangan destinasi yang menitikberatkan peran masyarakat lokal. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan tidak hanya pada tahap pelaksanaan tapi terlibat mulai dari tahap kajian, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap monitoring evaluasi. Berikut wawancara dengan informan tentang masyarakat lokal menjaga dan mengelola objek wisata bahwa :

“Awalnya kita bekerja secara individu lalu kita juga kerjasama dengan swasta dan pemerintah ya memang belum maksimal sesuai harapan kita namun paling tidak sudah ada pengembangan dan perbaikan supaya pariwisata ini nantinya tidak sia-sia memberikan manfaat bagi masyarakat setempat”.

Peran tokoh masyarakat atau orang yang dituakan di suatu daerah jelas memiliki peran tersendiri terhadap daerah atau lingkungannya, dalam sosiologi dikenal dengan konsep pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut mencakup segala proses yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan mengarahkan masyarakat mematuhi kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Tokoh masyarakat atau orang yang dituakan sebagai peredam konflik, pengarah bahkan menjadi pembimbing masyarakat. Maka dalam hal ini tokoh masyarakat dan pemerintah desa menjadi sebuah mediasi jika terjadi permasalahan khususnya mengenai pengembangan pantai.

Ketika berbicara pengembangan, tentunya konsep CBT juga mengembangkan komunitas yang berskala kecil dengan memiliki objek wisata serta atraksi yang memunculkan sebuah manfaat bagi wisatawan. Hadirnya wisata Pantai Gemah sedikit banyaknya berdampak terhadap masyarakat sekitar dari segi sosial ekonominya, baik itu adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan juga peningkatan pembangunan infrastruktur yang diperoleh dari dana retribusi, dana CSR dari perusahaan/instansi, dan donator. Jelas pengaruh peran masyarakat terhadap wisata alam ini dimana pengelolaannya Keuntungan dari retribusi wisata alam rammang-rammang dipakai untuk membangun sarana dan prasarana Berdasarkan hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

“Hasil retribusi di bagi untuk masyarakat kampung berua 50%, 25% ke pemerintah desa, 25% ke kelompok sadar wisata untuk perawatan dan pengelolaan”

Hasil retribusi yang menjadi hasil pendapatan tersebut yang menjadi pijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata selanjutnya maka dari itulah disini konsep CBT muncul dalam rangka memberdayakan masyarakat. Hal ini diketahui bahwa tanpa adanya masyarakat maka pengembangan tidak sebaik saat ini. Dijelaskan sebagai berikut :

“Ya mereka yang pada jualan dan punya atraksi bisa ditampilkan kita nggak membatasi apapun dan siapapun bisa mencari keuntungan tapi ya tetap retribusi sistemnya bagi hasil karena kita juga berupaya mengadakan APBD bagi pengembangan wilayahnya”

Wisata Pantai Gemah dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, guna membantu para wisatawan agar dapat meningkatkan kesadaran, biasanya wisatawan dari mancanegara belajar mengenai masyarakat lokal dan belajar tata cara hidup masyarakat lokal atau *local way of life*. Wisata Pantai Gemah bukan hanya bisnis wisata yang menekankan pada keuntungan atau aspek ekonomi saja namun wisata Pantai Gemah dapat memberikan pelajaran bahwa di zaman sekarang sangatlah sulit menjaga alam tetap lestari terlalu banyak orang-orang yang rakus dan hanya mementingkan diri sendiri untuk memperkaya diri tanpa berpikir keberlangsungan makhluk hidup yang bergantung pada alam sekitar.

Dalam hal ini organisasi karang taruna Desa setempat juga melihat adanya potensi obyek wisata untuk dikembangkan menjadi tempat wisata andalan di Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Keboireng. Selain itu menurut ketua karang taruna melihat bahwa masih tingginya angka pengangguran yang ada di Desa Keboireng, sehingga timbul inisiatif untuk mengembangkan objek wisata Pantai Gemah dengan prinsip pemberdayaan anggota karang taruna dan masyarakat.

Maka dari itulah konsep CBT sebagai pengelolaan obyek wisata yang baik dan berkelanjutan dapat menjadikan sumber pendapat ekonomi baik bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah khususnya masyarakat Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

4.2.2 Upaya pemerintah dalam pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam. Berbagai model

pemberdayaan masyarakat dalam dinamika pengembangannya, tidak luput dari peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Peran Pemerintah adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

Pemerintah sebagai Kepala Desa adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

a. Program Kerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memfasilitasi masyarakat untuk membentuk suatu forum sadar wisata dan pengembangan pariwisata yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di provinsi Indonesia. Hal tersebut menjadi program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata yaitu pendampingan forum sadar wisata yang bisa meningkatkan kesadaran pariwisata yang baik bagi masyarakat agar masyarakat bisa lebih sadar akan potensi pariwisata yang dimilikinya, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih mengeksplorasi potensi disekitarnya untuk dijadikan suatu alternatif objek wisata di Indonesia. hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jamaliano selaku anggota Pokdarwis Bidang Ketertiban bahwa

Pokdarwis tu anggotanya yang benar-benar sadar pariwisata. Awalnya kita generasi muda yang mempunyai pikiran untuk mengembangkan wisata di daerah sini. Nah, kita sepakat mendirikan Pokdarwis dan mendatangi Dinas Pariwisata untuk dibuatkan SK. Setelah dibuatkan SK, ya kita mulai bergabung dalam Pokdarwis dan sering sekali kita melakukan sharing. Setiap sebulan sekali, antar Pokdarwis se kabupaten (Bapak Jamaliano).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh penuturan Bapak Guntur selaku Anggota Pokdarwis Bidang Humas bahwa

Kita tidak pernah mengajukan dana untuk pengembangan wisata Pantai Gemah, kita hanya mengikuti program pemerintah. Setiap 2 minggu sekali kita ada sharing untuk pengembangan wisata (Bapak Guntur).

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengembangkan wisata di Kabupaten Tulungagung, pemerintah memiliki program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata yakni dengan melakukan pendampingan forum sadar wisata untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran pariwisata bagi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan ungkapan ketua RW setempat yaitu :

“Ya pokdarwis memang sangat aktif sekali mbak karena ini se kabupaten makanya dikoordinasi rw masing-masing supaya kelurahan mudah mendata untuk pertemuan se kabupaten kalau ada program baru”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dukungan yang lebih juga diberikan oleh perangkat desa setempat di tingkat RW sekitar pantai Gemah Tulungagung karena ikut merasakan dampak positifnya pariwisata yang dikembangkan

b. Perizinan

Dalam mengembangkan pariwisata, pemerintah sangat membantu masyarakat, yakni dengan memudahkan dalam hal perizinan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Guntur selaku Humas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung sangat

membantu kami dalam pengembangan wisata ini. Dulu kita mudah sekali dalam membentuk Pokdarwis ini. Awalnya kita membentuk kelompok, dan kita mendatangi Dinas Pariwisata untuk pembuatan SK. Dinas Pariwisata sangat membantu kami (Bapak Guntur).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Agus Sunyoto selaku Sekretaris Pokdarwis bahwa

Dinas Pariwisata sangat mendukung kami mbak. Pemerintah selalu mengarahkan kami, jika kami kurang paham. Selain itu, mereka juga membantu kami dalam urusan perizinan. Awalnya Pokdarwis ini adalah pemuda-pemuda yang sadar akan adanya potensi wisata di Desa keboireng ini. Kita melakukan musyawarah yang akhirnya kita mendatangi Dinas pariwisata untuk membuatkan SK. Kalau sudah ada SKnya, kita jadi lebih semangat untuk mengembangkan, karena istilahnya kan kita sudah diakui. (Agus Sunyoto)

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung sangat mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung dengan cara memudahkan masyarakat atau pihak-pihak pengelola dalam mengembangkan pariwisata yakni dengan melalui memudahkan pengelola pariwisata dalam hal perizinan.

c. Pengadaan Fasilitas

Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung juga berkontribusi dalam pengadaan fasilitas di Pantai Gemah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Purnomo selaku Ketua Pokdarwis bahwa

Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung juga berkontribusi dengan mengadakan beberapa fasilitas guna dipakai oleh pengunjung, berupa Flying Fox (Bapak Purnomo).

Hal tersebut dikuatkan oleh Bapak jamalianto bahwa

Kalau ATV ini dari perseorangan yang juga anggota dari Pokdarwis dan Warga Keboireng, yang juga menjadi salah satu icon di Pantai Gemah ini. Nah kalau Flying Fox ini dari Dinas Pariwisata. Jadi untuk

mengembangkan wisata pantai ini kita kerjasama, apa yang sekiranya dibutuhkan pelanggan, ya kita mencoba sharing dulu (Bapak Jamaliananto)

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memfasilitasi masyarakat demi mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat adalah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dalam menunjang kepariwisataan. Adapun dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana.

Di wilayah Pantai Gemah disediakan lahan untuk pembangunan warung-warung yang tentunya hal tersebut juga akan dicari oleh banyak pengunjung. Mengenai hal tersebut, Bapak Jamaliananto menyatakan bahwa

Dimulai dari tahun 2013 Pokdarwis mulai menanam cemara. Sebelumnya disini hutan mbak, tapi Pokdarwis mempunyai usaha untuk menanam cemara. Namanya perjuangan juga banyak hambatan, seperti penempatan orang jualan. Kebetulan para penjual disini warga Keboireng dan juga anggota Pokdarwis. Awalnya kita beri kapling-kapling, setelah itu dilotre untuk menentukan penempatan warungnya, setelah mereka dapat lalu dibangun sendiri warung-warungnya (Bapak Jamaliananto).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Tin selaku warga Desa Keboireng yang menyatakan bahwa

Disini untuk pembagian lahan warungnya cukup adil ya mbak. Khusus untuk warung, ditempatkan di satu lahan. Pembagiannya dengan cara dilotre. Dengan adanya lahan khusus untuk warung-warung, jadi pantai masih terlihat rapi dan tidak kotor.

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola, baik pemerintah, perhutani dan pokdarwis sangat memperhitungkan lahan khusus untuk penjual makanan agar pantai tetap terlihat rapi dan tidak mengganggu pengunjung yang ingin menikmati pemandangan pantai. Adanya warung-warung tersebut tentunya juga akan memudahkan para pengunjung

untuk membeli sesuatu. Dalam mengatur lahan pihak pengelola juga menerapkan biaya sewa untuk warung-warung. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Meta selaku penjual dan warga Desa Keboireng bahwa

Untuk satu tahun, kita sewa lahan disini Rp. 1.200.000,00. Harga segitu sudah meliputi biaya keamanan dan kebersihan wilayah Pantai Gemah. Harga segitu juga tidak terlalu mahal lo mbak untuk biaya sewa di lokasi wisata (Meta).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Tin selaku penjual dan warga Desa Keboireng bahwa

Untuk penyewaan lahan sendiri dikenakan biaya sewa Rp. 1.200.000,00 per tahun. Biaya sewa tersebut telah meliputi biaya keamanan serta kebersihan area wisata (Ibu Tin).

Kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya sewa lahan untuk membuka warung di area wisata Pantai Gemah dikenai biaya Rp. 1.200.000,00 per tahun. Biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya keamanan dan kebersihan.

Dengan adanya warung-warung di lokasi wisata Pantai gemah, secara otomatis memberikan dampak yang kurang baik bagi kebersihan pantai. Oleh karena itu, dalam menyikapi hal tersebut, pihak pengelola mengenakan biaya untuk kebersihan di area wisata pantai Gemah untuk para penjual. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jamaliano bahwa

Adanya warung disini sangat berkontribusi dalam adanya sampah. Oleh karena itu, kita mengambil biaya sewa untuk dana kebersihan sebanyak Rp. 10.000,00 per minggu. Disini sampah terbagi menjadi dua, yakni sampah pengunjung dan sampah laut. Untuk sampah yang di bawah cemara itu kan sampah pengunjung, itu tanggungan pengelola. Kalo sampah laut, itu tanggungan 3 pengelola, yakni pengelola, perhutani dan pemma. Makanya setiap hari jumat ada gotong royong membersihkan sampah laut (Jamaliano).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Guntur yang menyatakan bahwa Para penjual disini tidak keberatan jika kami mengenakan biaya untuk kebersihan yang diambil dari biaya sewa per tahun. Para warga disini sudah mempunyai kesadaran dalam hal kebersihan. Kalau pantai gemah ini bersih, otomatis pengunjung akan merasa nyaman berada disini.

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan warung-warung di area wisata akan berdampak pada banyaknya sampah-sampah pengunjung di area wisata Pantai Gemah. Oleh sebab itu, pihak pengelola mengenakan biaya untuk kebersihan bagi para penjual di area wisata Pantai Gemah. Dengan adanya biaya untuk kebersihan, maka kebersihan area wisata Pantai Gemah akan tetap terjaga.

Banyaknya pengunjung yang mengunjungi Pantai gemah, membuat pengelola menciptakan strategi baru untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rencana pembangunan homestay di Pantai gemah agar pengunjung mengalami peningkatan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan Bapak Jamaliano bahwa

Untuk program lanjutan kita planning membuka *homestay*. Karena banyak pengunjung yang mengeluhkan penginapan, disini kurang penginapannya. (Bapak Jamaliano).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Guntur bahwa Di Pantai Gemah ini banyak pengunjung dari luar kota, mungkin mereka tahu Pantai gemah ini melalui media sosial. Nah mereka ini banyak yang mengeluh mengenai penginapan. Kalau tidak ada penginapan otomatis mereka PP dari asal menuju ke Pantai Gemah ini, jadi otomatis juga terlalu capek. Jadi mungkin, kedepannya ini kami akan membangun homestay. Agar pengunjung dari luar kota tidak perlu susah-susah jika mencari penginapan (Bapak Guntur).

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola Pantai Gemah mempunyai rencana strategi untuk memudahkan pengunjung dalam mencari penginapan, yakni menambah fasilitas dengan membangun homestay. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengunjung luar kota dalam mencari penginapan dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung.

d. Kerjasama Dengan Berbagai Pihak

Dalam mengembangkan wisata berbasis masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh 1 pihak saja, namun dilakukan secara bekerjasama berbagai pihak. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua Pokdarwis, bahwa

Pantai wisata gemah dikelola oleh 3 pihak, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Dinas Perhutani, serta Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Alam Asri desa Keboireng (Bapak Purnomo)

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Jamaliano selaku Seksi Ketertiban Kelompok Sadar Wisata bahwa

Pengelolaan pantai gemah bukan hanya dikelola oleh Pokdarwis saja. Awalnya memang dikelola oleh pokdarwis yang dibantu oleh pemda dan didalamnya terdapat LMDH. Kemudian mulai 1 Januari 2017 sudah ada perjanjian kerjasama antara pengelola, pemda, dan perhutani (Bapak Jamaliano).

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pantai Gemah dilakukan secara kerjasama antar berbagai pihak, yakni antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Kelompok Sadar Wisata Alam Asri Desa Keboireng dan Perhutani Kabupaten Tulungagung. Kerjasama tersebut dilakukan agar pengelolaan wisata Pantai gemah dapat dilakukan secara optimal. Selain 3 pengelola tersebut, tentunya masyarakat juga ikut serta dalam mengelola wisata Pantai Gemah khususnya dalam hal kebersihan dan ketertiban.

Dengan adanya kerjasama tersebut, pihak pengelola selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan ataupun sebelum

menentukan peraturan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jamaliano bahwa

Lokasi ini ada 2 tempat. Lapak disini merupakan tanah timbul yang dimiliki oleh pemda, dan lapak di belakang itu milik perhutani. Nah, kita disini ada sharing atau bagi hasil dengan perhutani, pemda, dan pengelola itu sendiri. Ada dua jenis sharing, yakni sharing dari tiket dan dari parkir. Itu beda bagi hasilnya. Jadi ini wilayahnya bukan murni milik pengelola, tapi milik bersama, jadi kalau ada kegiatan, kita selalu musyawarah baik dengan pemda maupun dengan perhutani (Bapak Jamaliano).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Purnomo yang menyatakan bahwa

Kita tidak bisa menentukan sesuatu hanya dengan satu pihak saja. Soalnya disini sistemnya kerjasama mbak, jadi apapun yang akan kita lakukan itu harus berdasarkan musyawarah. Karena area wisata Pantai Gemah ini adalah milik bersama, bukan Cuma milik salah satu pihak saja. Untuk pendapatan di Pantai Gemah pun juga begitu, harus dibagi. Tidak Cuma diterima oleh salah satu pihak saja (Bapak Guntur).

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama antar pengelola, maka pihak pengelola selalu melakukan musyawarah sebelum menentukan suatu keputusan. Selain itu pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk dan biaya parkir juga dilakukan dengan cara bagi hasil kepada pihak pengelola.

Pembagian pendapatan dari tiket masuk dan parkir dijelaskan oleh Bapak Jamaliano yang menyatakan bahwa

Disini kan tanahnya bukan murni milik pokdarwis aja mbak, tapi juga milik pemda, milik perhutani juga. Jadi semua pendapatan harus kita bagi rata. Misalnya untuk pendapatan dari karcis parkir, pihak 1 memperoleh 30% dari total pendapatan parkir, pihak ke 2 dapat 20% dan pihak ke 3 dapat 50%. Ketentuan itu kita lakukan dengan cara

musyawarah. Jadi bukan keputusan dari salah satu pihak saja (Bapak Jamaliano).

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Guntur, bahwa Untuk pembagian pendapatan dari karcis parkir, pihak ke 1 mendapatkan 30% dari total pendapatan parkir, pihak ke 2 mendapatkan 20% dan pihak ke 3 mendapatkan 50% dari total pendapatan parkir. Nah untuk pendapatan dari tiket pengunjung, Pihak ke 1 sebesar 15%, pihak ke 2 sebesar 25%, dan pihak ke 3 mendapatkan 60% dari total pendaptan tiket masuk pengunjung.

Kedua pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Jumarli selaku Ketua Pokdarwis yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Keboireng bahwa

Dan pembagian PKS sudah disepakati, nah kemaren sudah saya wanti-wanti, saya mau PKS, tapi kalo desa dikalahkan, ya saya tidak mau. Jadi dari pihak perhutani 15%, dari pihak Pemkab 25%. Lainnya itu desa. Cuma desa kan juga minta bantuan yang lain, ada Muspika, LMDH, pengelola dan sampah, Jasa Raharja, dari segi 60% tadi dijadikan 100%, PAD nya desa itu 15%.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil atas penarikan karcis parkir yakni pihak ke 1 sebesar 30%, pihak ke 2 sebesar 20%, dan pihak ke 3 sebesar 50%. Sedangkan bagi hasil atas penarikan tiket pengunjung yakni pihak ke 1 sebesar 15%, pihak ke 2 sebesar 25%, dan pihak ke 3 sebesar 60%. Ketentuan pembagian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antar pengelola wisata Pantai Gemah. Hal ini diperkuat dengan ungkapan ketua RW setempat, yaitu :

“Betul sekali semua atas dasar musyawarah karena memang tidak ada ketentuan paten mengenai pembagian itu mbak kita hanya berpedoman ada sistem bagi hasil saja jadi semua perangkat desa termasuk pejabat RT maupun RW dilibatkan meskipun hasilnya tidak berupa materi paling

tidak ada manfaat positif bisa dalam hal fasilitas kampung setelah pantai gemah ini semakin dikenal objek pariwisatanya”

Adanya kerjasama antar pengelola yang terdiri dari Pokdarwis, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Perhutani berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Meta selaku warga Desa Keboireng bahwa

Dengan adanya strategi pengembangan pengunjung menjadi lebih banyak terutama pada hari Sabtu Minggu dan hari hari libur. Banyak manfaat yang didapat dari adanya strategi pengembangan ini, mulai dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh instansi tertentu dan lingkungan yang menjadi lebih tertata serta bersih (Meta masyarakat).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Jumarli selaku Ketua Pokdarwis yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Keboireng bahwa

Dampaknya tetap ada peningkatan. Kalau memang tidak ada undang-undang baru sebenarnya kita tidak mau kerjasama dengan Pemkab. Karena ada uud baru, maka kita harus kerjasama. Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan antara tanah timbul, tanah milik perhutani, kita tidak mempermasalahkan. Karena itu wilayah bersama. Undang-undang presiden menyatakan tentang desa yang mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan jadi desa wisata. Nah prinsip saya dulu seperti itu, nah karena ada undang-undang baru, karena jika dikelola sendiri, pasti ada pungli, maka kita adakan kerjasama. (Bapak Jumarli)

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Perhutani dan Pokdarwis berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung. Selain itu adanya kerjasama tersebut juga membuat area wisata lebih tertata dan lebih bersih, karena adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti untuk membersihkan area wisata. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara narasumber ketua RT setempat:

“Ya betul dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung ini memberikan dampak baik bagi kampung kami jadi sering ada program bersih-bersih seperti kerja bakti gotong royong yang jelas gawe guyup sak lawase”

Hal ini juga diperkuat oleh ketua RW setempat yaitu :

“Jelas mbak berimbas sekali di daerah tempat tinggal kami jadi lebih memperhatikan lingkungan karena dekat pantai GEMAH yang menjadi pusat kunjungan pariwisata saat ini”

Maka dari kedua hasil ungkapan ketua RT dan ketua RW tersebut menunjukkan bahwa kerjasama menjadi stimulasi terbaik bagi berkembangnya pengelolaan lingkungan setempat pantai gemah Tulungagung. Berkembangnya pariwisata ini menunjukkan adanya pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat setempat khususnya di bidang ekonomi. Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masing-masing.

4.2.3 Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).

Untuk lebih memastikan dalam menjalankan strategi bisa berjalan lancar terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Objek Wisata pantai Gemah.

- a. Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata
 - 1) Lembaga non formal / pihak swasta

Kerjasama dengan pihak swasta dapat mengenalkan potensi – potensi yang dimiliki di Pantai Gemah yang mengakibatkan banyak pengunjung / masyarakat ingin mengetahui secara langsung wisata apa saja yang ada di Pantai Gemah.

Peneliti menemukan faktor pendukung tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jumarli bahwa

Terjalannya kerjasama yang baik di lingkungan SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah akan membawa pengaruh yang baik pula di daerah tersebut. Karena instansi satu dengan yang lain saling mendukung program dengan tidak mengambil ranah yang sudah ditetapkan. Contohnya yaitu ketika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ingin memperbaiki akses menuju objek wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait akses menuju objek wisata (Bapak Jumarli).

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Bapak Guntur bahwa Dalam mengelola wisata Pantai Gemah ini kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi kita saling bekerjasama, antar pemerintah kabupaten, perhutani, pokdarwis, dan masyarakat itu sendiri. Dengan bekerja sama, otomatis semua tujuan untuk mengembangkan wisata ini mudah dicapai. Kita jadi saling bantu membantu (Bapak Guntur).

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan wisata Pantai Gemah dilakukan dengan kerjasama antar berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten, perhutani, pokdarwis, dan masyarakat. adanya kerjasama tersebut sangat memudahkan dalam mencapai tujuan bersama yakni mengembangkan wisata Pantai Gemah. Hal yang senada juga disampaikan oleh ketua RT setempat yaitu :

“ya mbak kalau nggak kerjasama masak bisa sampai kayak gini jadi ya saya mendukung sekali adanya kerjasama dan keterlibatan masyarakat setempat khususnya masalah ekonomi kan dengan jualan bisa nambah penghasilan”

Dukungan yang diberikan ketua RT memberikan sebuah dorongan bagi pengelola untuk semakin mengembangkan lokasi wisata. Kemudian, hal yang sangat penting dalam mengembangkan Wisata Pantai Gemah yakni mengenai akses jalan menuju Pantai Gemah. Akses jalan yang baik akan mendorong para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Gemah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Nino selaku pengunjung Pantai Gemah bahwa

Saya sering berkunjung ke Pantai Gemah. Sebelum jalannya diperbaiki dan sebelum ada warung-warung, disini masih kurang bersih. Sekarang kebersihannya sudah lumayan baik daripada yang dulu (Nino).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Ani selaku pengunjung yang menyatakan bahwa

Saya sudah beberapa kali datang dengan keluarga besar, bahkan mengadakan reuni di Pantai Gemah karena aksesnya sangat mudah, suasananya enak, ada wahanan ATV dan flying fox, spot-spot foto yang bagus, serta makanan yang enak dan murah-murah (Ibu Ani).

Kedua wawancara tersebut diperkuat dengan pernyataan Rina selaku pengunjung yang menyatakan bahwa

Saya sudah beberapa kali datang kesini, karena aksesnya mudah, tiketnya murah, prasarana yang ditawarkan beragam, dan makanannya enak-enak terutama makanan yang dari olahan ikan (Rina).

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan akses jalan untuk menuju Pantai Gemah sudah cukup mudah dan hal tersebut dapat mendorong para wisatawan untuk berkunjung lagi ke Pantai Gemah. Selain itu, adanya warung makanan dan prasarana yang ditawarkan dapat membuat pengunjung tertarik untuk mengunjungi Pantai Gemah.

2) Partisipasi masyarakat

Usaha pengembangan pariwisata tidak dapat terlepas dari peranan dan partisipasi masyarakat di sekitar obyek wisata. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata antara lain dengan menyediakan sarana wisata seperti warung, fasilitas olahraga serta kesediaan masyarakat untuk menerima wisatawan yang berkunjung ke Pantai Gemah.

Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata berbasis CBT, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jumarli bahwa

Masyarakat di Pantai Gemah sangat antusias mbak, karena pengembangan pariwisata berbasis CBT ini bermanfaat bagi masa depan mereka. Namun dengan adanya pengembangan pariwisata di Pantai Gemah ini diharapkan jangan merusak alam karena potensi alam lah yang menjadi simbol di Pantai Gemah ini (bapak Jumarli).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Tin bahwa Kita sebagai warga masyarakat sangat senang sekali dengan dibukanya wisata di desa kami. Adanya wisata Pantai Gemah ini sangat membantu perekonomian kami. Selain itu banyak warga yang beralih mata pencaharian. Kalau ada obyek wisata disini juga dimanfaatkan oleh kebanyakan ibu-ibu warga sini. Dulu ibu-ibu banyak yang Cuma di rumah, kalau sekarang ya bisa jualan, daripada nganggur di rumah (Ibu Tin).

Partisipasi masyarakat di wilayah wisata Pantai Gemah ini juga ditandai dengan masyarakat selalu dilibatkan oleh pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Sri selaku warga Desa keboireng yang menyatakan bahwa

Pengembangan pariwisata di Pantai Gemah sudah sangat bagus. Meskipun tidak semua masyarakat sekitar adalah anggota Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), akan tetapi mereka secara rutin diberikan informasi mengenai hasil keputusan-keputusan Pokdarwis mengenai pengelolaan pengembangan pariwisata (Bu Sri).

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Meta bahwa

Masyarakat selalu dilibatkan dalam program-program yang ada. Dalam pengembangan ini persaingan antar pedagang di dalam objek wisata menjadi lebih sehat, karena harga penjualan telah ditentukan rata-ratanya (Meta).

Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Tulungagung khususnya di obyek wisata Pantai Gemah. Bentuk keterlibatan masyarakat yaitu dalam penarikan retribusi dan mengelola parkir yang terdapat dalam area obyek wisata. Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dalam kaitannya pengembangan pariwisata yaitu bisa menambah penghasilan dengan cara berjualan di sekitar area obyek wisata. Di sekitar obyek wisata disediakan kios yang sengaja dibangun pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk disewakan kepada masyarakat umum untuk membuka usaha.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jumarli bahwa Untuk peningkatan dari awal sampai sekarang dari bulan ke bulan selalu meningkat perekonomiannya. Masyarakat sangat terbantu dengan dibukanya tempat wisata disini. banyak masyarakat yang beralih mata pencaharian, dulu mereka menjual hasil panen harus ke kota, kalau sekarang cukup disini saja (Bapak Jumarli).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Jamaliano bahwa Perkembangan perekonomian sangat luar biasa. Untuk penduduk keboireng ini berjualan disini memang tempat ini dikhususkan untuk para warga keboireng. Sekarang mata pencaharian warga keboireng ya berubah. Dulu cari batu cari kayu, sekarang sudah nggak lagi. Sudah berjualan, kebiasaan merusak hutan sudah berkurang. Jadi sngta membantu dari segi ekonomi. dulu jualan degan aja harus ke kota, sekarang dijual disini aja kurang. Durian disini kurang2.. jadi banyak menciptakan lapangan kerja. Seperti perahu, ATV, tiket, parker iu yang mengelola anak karang taruna. Kalo pokdarwis sendiri pengurusnya 21, tapi

yang terlibat 65, di dalamnya ada anak muda yang kita rekrut untuk membantu mengelola ini. (Bapak Jamaliananto).

Kedua pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Tin bahwa Sebelum adanya strategi pengembangan pariwisata, daerah sekitar tergolong cukup sepi. Bahkan kurang diminati oleh pengunjung. Kemudian dengan adanya pengembangan pariwisata pengunjung sekarang mulai banyak yang berdatangan serta kondisi perekonomian masyarakat sekitar wilayah pantai mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat sekitar selalu dilibatkan dengan program-program yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata meskipun keterlibatannya terkadang secara tidak langsung (Bu Tin).

Dari ketiga wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan wisata Pantai Gemah, pihak pengelola selalu melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengembangkan wisata di pantai gemah. Selain itu pengembangan pariwisata berbasis CBT merupakan peningkatan perekonomian masyarakat daerah wisata dari masyarakat dan untuk masyarakat.

b. Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata

1) Lingkungan

Objek wisata Pantai Gemah memiliki keindahan alam yang indah dan menarik seperti berupa kaki bukit, gunung, air terjun (jurug), sungai, hutan serta iklim yang sejuk. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung karena pada dasarnya pengunjung lebih menyukai wisata yang alami atau *back to nature*. Namun keindahan lingkungan yang dimiliki Pantai Gemah tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah.

Hambatan yang timbul dari wisatawan dan masyarakat sekitar objek wisata adalah masih kurangnya kesadaran para wisatawan dan masyarakat sekitar objek wisata untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak ditemukan sampah di sekitar objek wisata. Banyaknya sampah yang ditemukan di lokasi Wisata Pantai Gemah. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan objek wisata. Tidak diperuntukkan oleh wisatawan saja tetapi semua

yang ada. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Meta selaku warga masyarakat Desa Keboireng bahwa

Menurut saya, disini masih banyak sampah mbak. Padahal sudah disediakan temoat sampah, ya meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kesadaran para pengunjung disini kurang sekali. Masih saja membuang sampah sembarangan (Meta).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh ibi tin selaku warga masyarakat desa Keboireng bahwa

Para pengunjung kebanyakan tidak peduli dengan kebersihan area wisata. Mereka sering kali membuang sampah sembarangan. Jadi area wisata terlihat kotor. Meskipun disini setiap jumat selalu diadakan kerja bakti bagi pengelola, tapi sampah itu terus-terusan ada (Ibu Tin).

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di area wisata Pantai gemah terbilang masih kotor, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesadaran bagi pengunjung-pengunjung wisata Pantai gemah. Kebanyakan para pengunjung membuang sampah sembarangan sehingga membuat area wisata terlihat kotor.

2) Sumber daya

Kualitas sumber daya manusia terutama pengelola pariwisata merupakan faktor penting dalam usaha pengembangan pariwisata. Kualitas sumber daya yang baik akan menghasilkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien serta terciptanya mutu pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata. Sumber Daya yang dimiliki warga Desa Keboireng sangatlah terbatas, hal tersebut yang membuat perkembangan wisata Pantai gemah ini tidak pesat.

Hal itu diakui oleh pejabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam mempersiapkan potensi daerah menjadi sebuah objek wisata, pemerintah melakukan sejumlah pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan yaitu pelatihan pemandu wisata, pelatihan pengelolaan home stay dan kuliner. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan ekonomi kreatif.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan Bapak Jumarli bahwa

Saat ini kami sedang menyiapkan dan melatih sumber daya manusia yang profesional dan ahli dalam bidangnya mas, terkait tentang perhotelan, restoran, biro perjalanan dan pemandu wisata kami berusaha yang mengisi tempat itulah adalah masyarakat di daerah sini sendiri. Nah, masyarakat disini ini SDM nya masih kurang ya, jadi perlu untuk dilakukan pelatihan-pelatihan. maka dari itu saya merencanakan untuk mengadakan berbagai macam pelatihan terkait hal tersebut dan siap maju ke tahap perencanaan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat, untuk itu pengembangan SDM sangatlah penting (bapak Jumarli).

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pemuda di desa Keboireng beliau menegaskan bahwa :

Iya masa kami diminta oleh pak lurah untuk mempersiapkan diri dan mempelajari dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan guna membangun SDM khususnya masyarakat di sekitar pantai Gemah agar kekayaan lokal bisa kembali pada masyarakat sendiri dan kami dari barisan pemuda Desa Keboireng siap untuk itu (Anton)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Keboireng memiliki SDM yang rendah. Oleh sebab itu, pemerintah merencanakan akan diadakan pelatihan bagi masyarakat desa Keboireng terkait dengan pengelolaan penginapan, pengelolaan restoran, dan pemandu wisata.

3) Fasilitas/sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata karena demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Pembahasan mengenai fasilitas/ sarana dan prasarana dalam penelitian ini terdiri dari 3 indikator, yaitu: 1) Sarana pokok kepariwisataan, yaitu perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya tergantung kepada lalu lintas wisatawan yang melakukan wisata, yang fungsinya mempersiapkan dan merencanakan wisatawan. Termasuk dalam kelompok ini adalah hotel, losmen, homestay, restoran, dan lain-lain. 2) Sarana

perlengkapan kepariwisataan, adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok, sehingga fungsinya membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah atau tempat yang dikunjunginya, yang termasuk dalam kelompok ini adalah fasilitas-fasilitas untuk bermain, olahraga, dan beribadah. dan 3) Sarana penunjang kepariwisataan, adalah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang sarana prasarana pokok sarana pelengkap yang berfungsi agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi tersebut, yang termasuk dalam kelompok ini adalah keberadaan pasar yang menjual berbagai hasil kerajinan dari masyarakat setempat dan warung-warung yang menjual makanan di area wisata.

a) Sarana pokok kepariwisataan,

Guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana khususnya sarana pokok dalam kepariwisataan yaitu perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya tergantung kepada lalu lintas wisatawan yang melakukan wisata, yang fungsinya mempersiapkan dan merencanakan wisatawan. Termasuk dalam kelompok ini adalah hotel, losmen, homestay, restoran, dan lain-lain. Sarana dan prasarana pokok pantai Gemah ini masih sangat kurang. Para wisatawan yang ingin bermalam sudah sangat kesulitan dalam mencari penginapan. Tidak jauh dari tempat ini sudah ada penginapan yang biasa dijadikan rujukan wisatawan, namun jumlahnya sangat terbatas.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jumarli yang menyatakan bahwa

Sarana dan prasarana yang disediakan di tempat wisata ini masih sangat jauh. Keadaan tersebut dikarenakan wisata ini adalah wisata alam, sehingga kami juga ingin menjaga kelestarian alam dengan tidak banyak pembangunan di area lokasi wisata yang dapat merusak lingkungan. Selain itu juga, lokasi wisata yang tidak memungkinkan karena lumayan jauh dari perkampungan (Bapak Jumarli).

Hal tersebut juga didukung oleh Ibu Tin yang merupakan warga Desa Keboireng yang menyatakan bahwa.

Saya rasa sarana yang disediakan kurang. Terutama biasanya para pengunjung dari luar kota mengeluhkan tentang penginapan ya. Disini

masih jarang sekali ada penginapan. Ada penginapan, tapi lokasinya sangat jauh dari area wisata Pantai Gemah (Ibu Tin).

Mengenai hal tersebut, Bapak Jamaliano menyatakan bahwa Kesulitan dalam mengelola yakni sampah dari pengunjung, penginapan yang lahannya milik perhutani, jadi kita gak bisa semau gue untuk membangun penginapan. Kita harus bekerjasama dengan pihak perhutani. Banyaknya pemikiran, saran, dan sebagainya membuat rencana untuk membangun penginapan itu sedikit terhambat (Bapak Jamaliano).

Bapak Toro selaku pengunjung juga menyatakan bahwa Saya beberapa kali datang kesini, tempatnya enak untuk berkumpul dengan keluarga. Sayangnya belum ada penginapan yang dekat dengan Pantai Gemah (Bapak Toro).

Sarana dan prasarana pokok pantai Gemah ini pada dasarnya kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama antar pengelola dan banyaknya saran yang diterima sehingga sulitnya memecahkan permasalahan. Sehingga pembangunan terkait sarana dan prasarana yang mendukung dan dapat mempermudah wisatawan masih belum terlaksananya, seperti penginapan dan restoran, dan sejenisnya.

b) Sarana perlengkapan kepariwisataan

Guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana khususnya sarana perlengkapan adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok, sehingga fungsinya membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah atau tempat yang dikunjungi, yang termasuk dalam kelompok ini adalah fasilitas-fasilitas untuk bermain, olahraga, dan beribadah.

Sarana pelengkap pada pantai gemah ini seperti fasilitas olahraga sudah tersedia, yaitu flying fox dan ATV yang banyak menjadi alasan para pengunjung untuk datang. Sementara sarana pelengkap seperti tempat bermain dan beribadah belum tersedia, sehingga bagi pengunjung anak-anak tidak ada tempat khusus untuk bermain. Sedangkan bagi para

pengunjung yang ingin melakukan ibadah dapat memanfaatkan peralatan seadanya yang seharusnya disediakan sendiri oleh pengunjung.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Guntur. Hasil wawancara tersebut adalah:

Sarana pelengkap yang ada di tempat wisata ini adalah flying fox dan ATV yang sudah kami sediakan. Pengunjung hanya mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp. 20.000 sudah dapat menyewa salah satu permainan tersebut. Sedangkan untuk tempat bermain khusus dan tempat beribadah belum tersedia, sehingga para pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas seadanya yang sudah tersedia (Bapak Guntur).

Hal tersebut dikuatkan oleh Bapak Guntur yang menyatakan bahwa Fasilitas/sarana dan prasarana pariwisata yang terdapat di Pantai Gemah kurang optimal, ini dikarenakan pengembangan pariwisata masih dua hingga tiga tahun ini. Seperti yang ditemukan di lapangan, akses menuju obyek wisata di Pantai Gemah berbatu dan berlubang, bila di musim hujan, jalan menjadi berlumpur. Selain itu fasilitas seperti tong sampah juga kurang diperhatikan. Akhirnya banyak ditemukan sampah yang berserakan di sekitar objek wisata (Bapak Guntur).

Hal tersebut juga didukung dari salah satu masyarakat yang berkunjung ke pantai Gemah tersebut.

Sarana pelengkap yang tersedia di wisata pantai Gemah ini sangat belum memadai, terutama yang sangat saya rasakan adalah tempat beribadah. Jadi, untuk pengunjung muslim tidak bisa leluasa melakukan ibadah ketika wisata ke tempat ini. Namun, kalau olahraga sudah tersedia, seperti Flying fox dan ATV (Bapak Ridwan).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sarana pelengkap di tempat wisata pantai Gemah ini juga belum memadai. Terutama tempat beribadan dan bermain bagi pengunjung anak-anak. Akan tetapi, sarana pelengkap seperti olahraga sudah ada yaitu flying fox dan ATV yang banyak menjadi alasan para pengunjung tertarik dengan tempat wisata lain, selain keindahan alam yang disuguhkan.

c) Sarana penunjang kepariwisataan

Guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana khususnya sarana penunjang kepariwisataan adalah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang sarana prasarana pokok sarana pelengkap yang berfungsi agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi tersebut, yang termasuk dalam kelompok ini adalah keberadaan pasar yang menjual berbagai hasil kerajinan dari masyarakat setempat.

Sarana penunjang di tempat wisata pantai Gemah ini belum tersedia sama sekali. Tidak ada fasilitas yang disediakan seperti pusat perbelanjaan terkait oleh-oleh khas tempat wisata. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jumarli. Hasil wawancara tersebut adalah:

Kalau sarana penunjang seperti pusat perbelanjaan di tempat wisata ini memang belum tersedia, namun untuk warung-warung makanan sudah ada lahan khusus untuk itu. Keadaan tersebut dikarenakan wisata ini lebih menekankan pada wisata alam, sehingga kami juga belum berencana mengembangkan hal-hal seperti pusat perbelanjaan. Kalau mungkin hanya sekedar oleh-oleh khas tempat wisata seperti kaos yang bertuliskan pantai Gemah, atau gantungan kunci, masih kami rencanakan kedepannya (Bapak Jumarli).

Hal tersebut juga didukung dari salah satu masyarakat yang berkunjung ke pantai Gemah tersebut.

Sarana penunjang memang belum ada, sehingga bisa ditambah dengan mengembangkan tempat wisata. Misalnya, jajanan khas daerah sekitar, kaos, dan sebagainya. Kalau untuk warung, disini

sudah cukup banyak ya mbak. Sudah ada lahan khusus untuk itu, jadi area wisata juga terlihat lebih rapi (Bapak Ridwan).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sarana penunjang di tempat wisata pantai Gemah ini memang belum tersedia namun sudah direncanakan. Perencanaan sarana penunjang tersebut diantaranya adalah oleh-oleh khas seperti kaos bertuliskan pantai Gemah,, gantungan kunci dan sebagainya. Namun, pihak pengelola belum memikirkan pengembangan seperti pusat perbelanjaan. Hal tersebut dikarenakan wisata ini lebih menekankan pada wisata alam dan sebagai langkah untuk menjaga kelestarian alam itu sendiri agar tidak terlalu banyak pembangunan yang dapat merusak alam khususnya di tempat wisata pantai Gemah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat penting dan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian nasional seperti penyerapan lapangan kerja. Produk modern pariwisata saat ini mulai banyak ditinggalkan dan wisatawan beralih kepada produk wisata yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya dan atraksi secara spesial. Kepuasan wisatawan tidak hanya bersandar pada keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata melainkan juga pada keleluasaan dan intensitas interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal.

Community Based Tourism (CBT) adalah model manajemen kepariwisataan yang dikelola oleh masyarakat setempat yang berupaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya dan pada saat menciptakan dampak ekonomi yang positif. Konsep CBT bermakna bahwa manajemen pariwisata ditempat bersangkutan dikelola oleh masyarakat setempat, ini meliputi pengelolaan kepariwisataan secara menyeluruh di lokasi tersebut, termasuk penyiapan semua produk/pelayanan yang dibutuhkan wisatawan (Ernawati, 2014).

CBT didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung yang telah berupaya diterapkan strategi pengembangan CBT oleh masyarakat sekitar dengan kerjasama antara stakeholders pemerintah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai macam atraksi dan usaha yang dikembangkan masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karang taruna Desa Keboireng dalam mengangkat pariwisata Pantai Gemah cukup berhasil dimana segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan teori yang dikemukakan Nasikun (2001) bahwa strategi pemberdayaan Community Based Tourism secara ekologis adalah strategi yang aman dan tidak menimbulkan dampak negatif hal ini dibuktikan dengan justru meningkatnya pendapatan dan tingkat kesadaran diri masyarakat sekitar untuk menjaga lokasi wisata dengan baik. Senada dengan Suhatini, dkk (2005) bahwa yang berperan dalam proses pemberdayaan salah satu ciri utamanya menitik beratkan pada peran dan partisipasi masyarakat sejak perencanaan sampai pelaksanaan dan pemeliharaan, maka yang paling berperan dalam proses pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri. Artinya, proses pemberdayaan itu terjadi atas dasar kemandirian masyarakat memanfaatkan segala bentuk potensi yang dimilikinya, seperti: potensi agama, ekonomi, kekuatan budaya, keelokan alam dan sebagainya.

Harus di sadari bahwa saat ini keinginan wisatawan semakin beragam. Demikian juga kesadaran akan pelestarian lingkungan dan tingkat kompetisi destinasi menjadikan para pelaku wisata khususnya dna masyarakat secara umum harus berbenah. Terkait dengan kesadaran wisata berbasis lingkungan, faktor sikap pelaku wisata dan wisatawan juga ditentukan oleh seberapa baik sikap pelaku maupun wisatawan dalam memandang lingkungannya. Semakin memiliki orientasi yang baik pada lingkungannya, maka pelestarian lingkungannya juga akan semakin baik (Sugandini, 2017)

Lebih lanjut Nasikun (2001) dijelaskan bahwa pariwisata dengan CBT memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi wisata berskala kecil oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas dan pengusaha kecil. Dalam pariwisata pantai gemah ditunjukkan melalui fasilitas sarana prasarana wisata serta permainan yang ada di sekitar pantai dengan lengkapnya wisata kuliner yang memanjakan wisatawan untuk menikmati lokasi pantai. Hal ini diawali dengan adanya karang taruna yang berkembang menjadi Pokdarwis yang membantu Pengkoordinasian antara pengelola desa wisata dengan masyarakat, fasilitas pemerintah memberikan pendanaan untuk mengelola desa wisata, mengembangkan atraksi wisata. Pembentukan Pokdarwis dan keterlibatan pemerintah dalam mengadakan pelatihan-pelatihan. Hal itu ditujukan supaya masyarakat untuk bangkit memberdayakan kehidupannya menuju sebuah kesejahteraan dan upaya sadar manusia agar keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati bersama oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses produksi secara adil serta memperhatikan kelestarian alam.

Karakteristik terakhir yang dikemukakan oleh Nasikun (2001) bahwa pemerintah mengutamakan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dimana pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi stakeholders oada masyarakat sehingga seluruhnya memahami strategi pengembangan pariwisata ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah yang menyebutkan bahwa “pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat” yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip ekowisata yaitu peran aktif masyarakat sekitar dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai - nilai sosial - budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan adanya pengembangan ekowisata ini masyarakat diberdayakan melalui kegiatan pariwisata.

Penerapan model *Community Based Tourism* (CBT) pada pengembangan Pantai Gemah Tulungagung peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan potensi wisata di Pantai Gemah

Tulungagung adalah pariwisata itu sendiri, karena pada dasarnya keberhasilan CBT sangat mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, penyelenggaraan sampai dengan pemanfaatan hasil industri kepariwisataan yang ada. Dengan penerapan CBT pada pengembangan Pantai Gemah Tulungagung dapat dibilang berhasil, dilihat dari partisipasi, manfaat yang diterima dan kemajuan Pantai Gemah Tulungagung dari awal hingga sekarang.

4.3.2 Upaya pemerintah dalam pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).

Dalam upaya mengembangkan wisata di Kabupaten Tulungagung, pemerintah memiliki program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata yakni dengan melakukan pendampingan forum sadar wisata untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran pariwisata bagi masyarakat.

Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung sangat mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung dengan cara memudahkan masyarakat atau pihak-pihak pengelola dalam mengembangkan pariwisata yakni dengan melalui memudahkan pengelola pariwisata dalam hal perizinan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memfasilitasi masyarakat demi mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat adalah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dalam menunjang kepariwisataan. Adapun dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana.

Pihak pengelola, baik pemerintah, perhutani dan pokdarwis sangat memperhitungkan lahan khusus untuk penjual makanan agar pantai tetap terlihat rapi dan tidak mengganggu pengunjung yang ingin menikmati pemandangan pantai. Adanya warung-warung tersebut tentunya juga akan memudahkan para pengunjung untuk membeli sesuatu. Dalam mengatur lahan pihak pengelola juga menerapkan biaya sewa untuk warung-warung. Biaya sewa lahan untuk membuka warung di area wisata Pantai Gemah

dikenai biaya Rp. 1.200.000,00 per tahun. Biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya keamanan dan kebersihan. Keberadaan warung-warung di area wisata akan berdampak pada banyaknya sampah-sampah pengunjung di area wisata Pantai Gemah. Oleh sebab itu, pihak pengelola mengenakan biaya untuk kebersihan bagi para penjual di area wisata Pantai Gemah. Dengan adanya biaya untuk kebersihan, maka kebersihan area wisata Pantai Gemah akan tetap terjaga.

Pengelola Pantai Gemah mempunyai rencana strategi untuk memudahkan pengunjung dalam mencari penginapan, yakni menambah fasilitas dengan membangun homestay. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengunjung luar kota dalam mencari penginapan dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung.

Pengelolaan Pantai Gemah dilakukan secara kerjasama antar berbagai pihak, yakni antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Kelompok Sadar Wisata Alam Asri Desa Keboireng dan Perhutani Kabupaten Tulungagung. Kerjasama tersebut dilakukan agar pengelolaan wisata Pantai gemah dapat dilakukan secara optimal. Selain 3 pengelola tersebut, tentunya masyarakat juga ikut serta dalam mengelola wisata Pantai Gemah khususnya dalam hal kebersihan dan ketertiban.

Dengan adanya kerjasama antar pengelola, maka pihak pengelola selalu melakukan musyawarah sebelum menentukan suatu keputusan. Selain itu pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk dan biaya parkir juga dilakukan dengan cara bagi hasil kepada pihak pengelola.

Bagi hasil atas penarikan karcis parkir yakni pihak ke 1 sebesar 30%, pihak ke 2 sebesar 20%, dan pihak ke 3 sebesar 50%. Sedangkan bagi hasil atas penarikan tiket pengunjung yakni pihak ke 1 sebesar 15%, pihak ke 2 sebesar 25%, dan pihak ke 3 sebesar 60%. Ketentuan pembagian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antar pengelola wisata Pantai Gemah.

Adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Perhutani dan Pokdarwis berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung. Selain itu adanya kerjasama tersebut juga membuat area wisata lebih tertata dan lebih bersih, karena adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti untuk membersihkan area wisata. Selain itu perkembangan yang terjadi dalam

pantai gemah ini memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjung karena pihak pengelola mampu menyajikan nilai guna yang tepat tentang pantai yaitu sebagai objek wisata dan harga sesuai dengan apa yang dinikmati.

Pengunjung yang bertindak ekonomis harus mempertimbangkan pengorbanan, yaitu harga yang harus dibayar dan hasilnya, yaitu manfaat atau nilai guna atau kepuasan yang diperoleh dari keindahan pantai Gemah itu sendiri. Sebagai sebuah contoh jarak untuk menempuh pantai ini jika pengunjungnya berasal dari kota tidak dekat bahkan harus menempuh berpuluh-puluh kilometer namun ketika sudah melihat objek wisata terasa bahwa semua terbayar atas pengorbanan di saat perjalanan menuju lokasi wisata.

Sesuai uraian di atas maka dapat dilihat bahwa analisis tersebut telah memberi gambaran yang cukup jelas tentang prinsip-prinsip pemaksimalan kepuasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berfikir secara rasional dalam memilih berbagai hal yang membuatnya merasa puas. Jika ditinjau dari pihak pengelola hal ini juga menunjukkan bahwa pihak pengelola mampu menciptakan komunitas berbasis ekonomi dalam kehidupan masyarakat karena dengan adanya sistem bagi hasil sesuai musyawarah akan memunculkan sebuah hal baru yang dapat dimiliki oleh komunitas tentunya berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan.

Hal ini senada dengan teori oleh wenger (2004) bahwa melalui adanya komunitas yang berbasis ekonomi tentunya ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan yaitu menjadi seorang wirausaha demi menciptakan kehidupan pembangunan ekonomi keluarga dan masyarakat yang lebih baik dan berkembang.

4.3.3 Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).

a. Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata

Dalam mengembangkan wisata Pantai Gemah dilakukan dengan kerjasama antar berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten, perhutani, pokdarwis, dan masyarakat. adanya kerjasama tersebut sangat

memudahkan dalam mencapai tujuan bersama yakni mengembangkan wisata Pantai Gemah.

Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Tulungagung khususnya di obyek wisata Pantai Gemah. Bentuk keterlibatan masyarakat yaitu dalam penarikan retribusi dan mengelola parkir yang terdapat dalam area obyek wisata. Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dalam kaitannya pengembangan pariwisata yaitu bisa menambah penghasilan dengan cara berjualan di sekitar area obyek wisata. Di sekitar obyek wisata disediakan kios yang sengaja dibangun pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk disewakan kepada masyarakat umum untuk membuka usaha.

Keadaan akses jalan untuk menuju Pantai Gemah sudah cukup mudah dan hal tersebut dapat mendorong para wisatawan untuk berkunjung lagi ke Pantai Gemah. Selain itu, adanya warung makanan dan prasarana yang ditawarkan dapat membuat pengunjung tertarik untuk mengunjungi Pantai Gemah.

b. Faktor Penghambat dalam Pengembangan Pariwisata

Di area wisata Pantai gemah terbilang masih kotor, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesadaran bagi pengunjung-pengunjung wisata Pantai gemah. Kebanyakan para pengunjung membuang sampah sembarangan sehingga membuat area wisata terlihat kotor.

Masyarakat Desa Keboireng memiliki SDM yang rendah. Oleh sebab itu, pemerintah merencanakan akan diadakan pelatihan bagi masyarakat desa Keboireng terkait dengan pengelolaan penginapan, pengelolaan restoran, dan pemandu wisata.

Mengenai sarana dan prasarana, Sarana dan prasarana pokok pantai Gemah ini pada dasarnya kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama antar pengelola dan banyaknya saran yang diterima sehingga sulitnya memecahkan permasalahan. Sehingga pembangunan terkait sarana dan prasarana yang mendukung dan dapat mempermudah wisatawan masih belum terlaksananya, seperti penginapan dan restoran, dan sejenisnya. Selain itu, sarana pelengkap di tempat wisata pantai Gemah ini juga belum memadai. Terutama tempat beribadah dan bermain bagi pengunjung anak-anak. Akan tetapi, sarana pelengkap seperti olahraga sudah ada yaitu flying fox dan ATV yang

banyak menjadi alasan para pengunjung tertarik dengan tempat wisata lain, selain keindahan alam yang disuguhkan. Mengenai sarana penunjang di tempat wisata pantai Gemah ini memang belum tersedia, namun sudah direncanakan. Perencanaan sarana penunjang tersebut diantaranya adalah oleh-oleh khas seperti kaos bertuliskan pantai Gemah,, gantungan kunci dan sebagainya. Namun, pihak pengelola belum memikirkan pengembangan seperti pusat perbelanjaan. Hal tersebut dikarenakan wisata ini lebih menekankan pada wisata alam dan sebagai langkah untuk menjaga kelestarian alam itu sendiri agar tidak terlalu banyak pembangunan yang dapat merusak alam khususnya di tempat wisata pantai Gemah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu :

1. Pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Starategi Pengembangan *Community Based Tourism* yang dilakukan oleh karang taruna dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa terdapat peran aktif masyarakat setempat dalam hal pariwisata sehingga menciptakan kondisi lokasi wisata yang berkembang. Penerapan model *Community Based Tourism* (CBT) pada pengembangan Pantai Gemah Tulungagung peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan potensi wisata di Pantai Gemah Tulungagung adalah pariwisata itu sendiri, karena pada dasarnya keberhasilan CBT sangat mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, penyelenggaraan sampai dengan pemanfaatan hasil industri kepariwisataan yang ada

2. Upaya pemerintah dalam pengembangan *Community Based Tourism*

Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).

Dalam mengembangkan wisata Pantai Gemah, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung seperti mengadakan program kerja dengan membentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), kemudahan dalam hal perizinan terkait pengembangan daerah wisata, pengadaan fasilitas di

tempat wisata, dan melakukan kerjasama antar berbagai pihak seperti Perhutani, Pokdarwis, dan masyarakat desa Keboireng.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengembangan

Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Objek Wisata Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung).

Saat menjalankan strategi untuk mengembangkan wisata Pantai Gemah, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau lembaga non formal, adanya partisipasi masyarakat dan pemerintah selalu melibatkan masyarakat. selain itu, akses jalan yang mudah dan beragam prasarana yang ditawarkan membuat pengunjung tertarik untuk mengunjungi Pantai Gemah. Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat, diantaranya adalah kurangnya kesadaran pengunjung dalam hal kebersihan, SDM masyarakat Keboireng yang rendah dan fasilitas/sarana prasarana di wisata Pantai Gemah yang kurang memadai.

5.2 Saran

Dalam mencapai tujuan yang lebih optimal sesuai dengan target dan keinginan berbagai pihak, maka penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan potensi yang dimiliki oleh area wisata Pantai Gemah, dibutuhkan peran pemerintah untuk segera menambah fasilitas untuk memudahkan dan menarik para pengunjung untuk mengunjungi Pantai Gemah.
2. Untuk pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Wisata Pantai Gemah harus melakukan koordinasi dengan baik untuk mengembangkan wisata

yang terdapat di daerah mereka yang harus ditanamkan sejak awal bukan hanya pihak pejabat desa tertentu saja namun masyarakat juga dapat dilibatkan karena bukan hanya dilibatkan di bidang wirausaha saja.

3. Melalui kepuasan yang dirasakan pengunjung sebaiknya pihak pengelola memiliki strategi yang lain supaya dapat lebih mengembangkan tingkat jumlah dan kepuasan pengunjung yang ada di Pantai Gemah sehingga kesan ramai pengunjung bukan hanya pada saat hari libur atau tanggal merah saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto .(2010). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka. Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo.
- Calgaro, Emma dan Kate Lloyd. 2008. "Sun, Sea, and Tsunami: Examining. Disaster Vulnerability In The Tourism Community of Khao Lak. Thailand." Singapore Journal of Tropical Geography.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti . (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat. Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://derap.id/dongkrak-pad-pemkab-tulungagung-giat-kembangkan-potensi-pariwisata/>
diakses pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 18.00 WIB
- Jogiyanto, H.M. 2007. Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman—. Pengalaman. Yogyakarta: BPFE.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo.
- Koentjaraningrat. 2008. Metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia. Jakarta.
- Martiarini (2017) Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketenger Baturraden. Skripsi. IAIN Purwokerto.
- Memorandum edisi 30 Maret 2017
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan. Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Moscardo, Gianna (2008), *Building Community Capacity for Tourism Development : Community Capacity Building : an Emerging Challenge for Tourism Development*, Cab Internasional, UK. (1-15)
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo,s. 2005. *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Pendit, Nyoman S. 2003. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Permenpar No.23 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Khusus sub bidang Pariwisata

Permenpar No.3 Tahun 2018 tentang Dana Alokasi Khusus sub bidang Pariwisata

Purnamasari, Andi Maya. 2011. Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning* Institut Teknologi Bandung. [Vol 22, No 1 \(2011\)](#)

Riyanto. Agus. (2011). Buku Ajar Metodologi Penelitian. Jakarta: EGC.

Sinclair, M. (1998), The economics of tourism. *Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management* Vol 3, 1-27.

Spillane J.J, 1987, Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta, Kanisius

Suansri, Potjana. 2003. Community Based Tourism Handbook. Thailand : Rest Project

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Bambang, Krisna Anugrah, Bobby Thalib. 2015. Model Pengelolaan Desa Wisata Religi di Desa Bongo. Laporan Penelitian Hibah CSR Laguna Asrama. Kode/ Nama Rumpun Ilmu: 699/ Kepariwisata

Sunaryo , Bambang, 2013 Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta; Gava Media.

Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta.

Timothy, D.J., "Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia," *Annals Review of Tourism Research*, XXVI (2) 1999

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan program Kementrian Perdagangan dan Ekonomi Kreatif

Yoeti, Oka A.. 2008. Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Penerbit. Kompas. Jakarta.

Zulfikar (2016) yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Disekitar Obyek Wisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Wilayah Kabupaten Lampung Barat (Studi Kasus Di Desa Kubu Perahu). Skripsi. IAIN Purwokerto.



DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA PANTAI GEMAH





Akses Jalan Menuju Pantai Gemah



Pintu Masuk Menuju Pantai Gemah



Pintu Keluar Pantai Gemah



Lokasi Kuliner Dan Penjualan Souvenir Pantai Gemah



Balai Penyewaan Untuk Berbagai Acara



Sarana Gubuk Untuk Pengunjung Pantai Gemah



Sarana Penyewaan Atv Dan Motor Thrill



Penyewaan Flying Fox



Penyewaan Banana Boat



Penyewaan Perahu Keliling



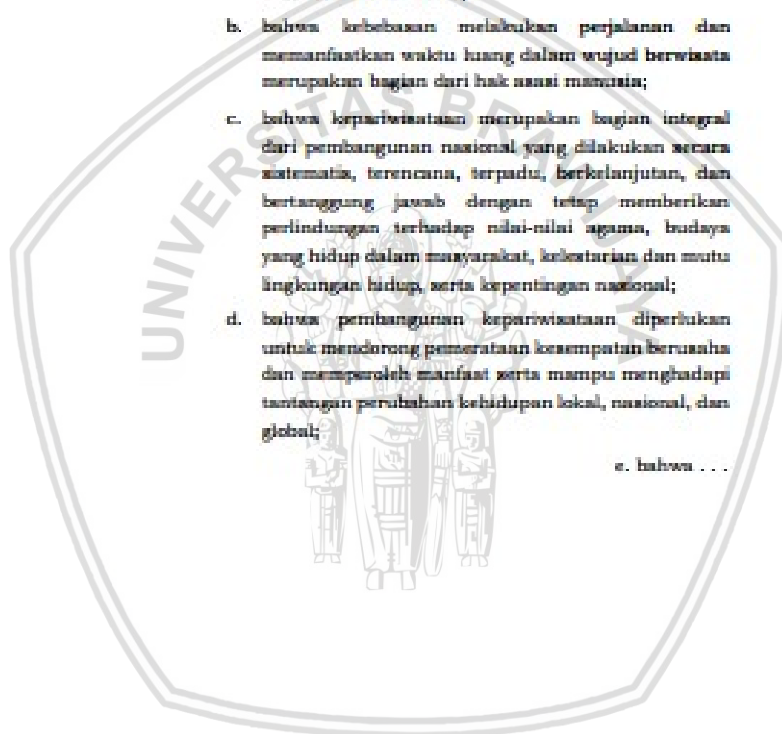
Beberapa Spot Untuk Berfoto

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, keberstarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa . . .



- 2 -

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaun tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataaun;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan ...



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
SUB BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknik memiliki kewenangan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);



MENTERI PARWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan menu Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, maka Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

SUB BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknik memiliki kewenangan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG****NOMOR 6 TAHUN 2012****TENTANG****KEPARIWISATAAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/peringgalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa agar pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;